

AUDIT KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DESA

(Studi Pada Proses Komunikasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa

Di Desa Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MUHAMMAD NASHIHUL AMIEN

0710310120



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

RINGKASAN

Muhammad Nashihul Amien 2011, Audit Komunikasi Pembangunan Desa (Studi Tentang Audit Komunikasi Pada Proses komunikasi Kepala Desa Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Pembimbing : (1)Dr. Suryadi. MS, (2). Drs.M. Shobaruddin MA 107 hal + vii.

Kompleksnya masalah pembangunan desa menuntut kesungguhan dari pemerintah desa untuk selalu berusaha memberikan hasil yang bermanfaat. Proses komunikasi dalam pembangunan memungkinkan pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Informasi mengenai pembangunan harus dikomunikasikan oleh kepala desa kepada perangkat desa, LPMD dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai dasar perencanaan yang matang. Setiap tahun Desa Tegalgondo selalu melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa yang dilakukan tidak terlepas hanya dengan pembangunan fisik tetapi juga mencakup pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Kajian analisis komunikasi yang mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan proses komunikasi dalam pembangunan desa, khususnya antara kepala desa dengan masyarakat merupakan suatu proses yang bergerak timbal balik. Disatu sisi, komunikasi dalam pembangunan akan menunjukkan berbagai kegiatan yang harus dijalankan oleh suatu desa dan ini selanjutnya menjadi tugas yang harus dipikul oleh pemerintah desa dalam usaha menciptakan pembangunan nasional. Tetapi disisi lain, pemerintah desa dapat pula menerima amanat dari pemerintah di atasnya tentang proyek-proyek yang sebaiknya dilakukan di desa tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi yang terjadi antara Kepala Desa dengan masyarakat untuk menyingkap kemacetan-kemacetan informasi, hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif dalam proses pembangunan, peluang-peluang yang perlu untuk dilaksanakan sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak berkepentingan yang lain Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Komunikasi Kepala Desa dengan Masyarakat dalam Pembangunan yang terjadi di Desa Tegalgondo dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Bentuk komunikasi langsung berupa rapat, ceramah, dan pertemuan. Sedangkan Proses Komunikasi dalam pembangunan yang sifatnya tidak langsung dengan menggunakan media surat dan laporan pertanggungjawaban. Proses komunikasi pada pembangunan desa dibedakan menjadi tiga tahapan yakni :Komunikasi pada Perencanaan Pembangunan, Komunikasi pada Pelaksanaan Pembangunan, Komunikasi pada Pengawasan Pembangunan.

Kata kunci: Kepala Desa, Komunikasi, Pembangunan.

SUMARRY

Muhammad Nashihul Amien 2011. The Audit Communication for Rural Development (Study on the Head of the Village Communication Process in Rural Development, in the Tegalondo Village, District Karangploso, Malang) Thesis, Department of Public Adminstration Faculty of Administrative Sciences Brawijaya Universities Malang. Supervisor : (1). Dr.Suryadi. MS ,(2) Drs. M. Shobaruddin. MA 107 + vii.

The complexity of rural development issues sue the seriousness of the village government to always try to give useful results. The process of communication in the construction of the village government allows for implement rural development.information on the development must be communicated by the head of the village to other personnel in government village, LPMD, and society so that the implementation of development has a basic planning. Each year the Tegalondo Village always doing rural development. Carried out village development can not be separated only by phisical development but also covers economic and society development. Studies in depth analysis and thorough communication about the implementation process of communication in rural development, especially between village heads and society is a reciprocal process feed back. On one hand, communication in development will demonstrate a variety of activities that must be run by village and it then became a task that must be borne by the village government in an effort to create national development. But on the other hand, the village may also receive a mandate from the government on top of project that should be done in the village of proficienly level.

This study aims to analyze the commuication that occurs between the village chief with the public to disclose information bottlenecks, barries to effective communication in the development process, opportunities that need to be implemented has been coordinated with the interested parties are another metod used is qualitative and descriptive analysis method. The result showed that the process of communication with the Head of community development village is happening in the Tegalondo Village can be clasified into two types, namely direct communication and indirect communication. Form of direct communication in the form of meetings, lectures, and meetings. While the process of communication in development that are not directly using the media letters and accountability reports. The process of communication in rural development can be divided into three stages namely : coomunication in development planning, communication on the implementation of development, and communication in development control.

Keywords: The Head of The Village, Communication, Development.

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

RINGKASAN iv

SUMMARY vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kontribusi Penelitian 6

E. Sistematika Pembahasan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Audit Komunikasi 10

1. Pengertian Audit 10

2. Pengertian Komunikasi 11

3. Pengertian Audit Komunikasi 16

B. Pembangunan Desa 27

1. Pengertian Pembangunan 27

2. Pengertian Pembangunan Desa 28

3.	Pesan Pembangunan Desa	31
C.	Kepala Desa	32
1.	Pengertian Kepala Desa	32
2.	Pesan Komunikasi Kepala Desa	34

BAB III METODE PENELITIAN 36

A.	Jenis Penelitian	36
B.	Fokus Penelitian	36
C.	Lokasi dan Situs penelitian	37
D.	Jenis dan sumber data	37
E.	Teknik pengumpulan data	38
F.	Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42

A.	Gambaran Umum dan Kondisi Lokasi Penelitian	42
1.	Keadaan Geografis	42
2.	Keadaan Demografis	44
3.	Keadaan Sosial Budaya	46
4.	Keadaan Sosial Ekonomi	49
5.	Keadaan Sarana dan Prasarana	51
6.	Keadaan Pemerintahan Desa Tegalondo	53
B.	Penyajian Data Fokus Penelitian	55
1.	Proses Komunikasi Kepala Desa dalam Pembangunan Desa	55
a.	Komunikasi pada Perencanaan Pembangunan Desa	53
1.	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	58
2.	Identifikasi Kebutuhan..	62

3.	Peran Artikulasi Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan.....	65
4.	Cara Komunikasi.....	69
5.	Kegiatan Komunikasi dalam Perencanaan.....	70
b.	Komunikasi pada Pelaksanaan Pembangunan Desa	73
1.	Cara Komunikasi.....	76
2.	Kegiatan Komunikasi dalam Pelaksanaan.....	77
c.	Komunikasi pada Pengawasan Pembangunan Desa.....	80
1.	Kegiatan Komunikasi dalam Pengawasan.....	82
d.	Hasil Pembangunan	84
2.	Faktor - Faktor Penentu Dalam Proses Komunikasi Pembangunan Desa	85
a.	Faktor Pendukung Komunikasi	85
b.	Faktor Penghambat Komunikasi	88
C.	Pembahasan	92
1.	Proses Komunikasi Kepala Desa dalam Pembangunan Desa.....	92
a.	Komunikasi pada Perencanaan Pembangunan Desa	93
1.	Identifikasi Kebutuhan..	94
2.	Peran Artikulasi Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan.....	94
3.	Cara Komunikasi.....	97
4.	Kegiatan Komunikasi dalam Perencanaan.....	98
b.	Komunikasi pada Pelaksanaan Pembangunan Desa	102
1.	Cara Komunikasi.....	102
2.	Kegiatan Komunikasi dalam Pelaksanaan.....	103
c.	Komunikasi pada Pengawasan Pembangunan Desa.....	106



1. Kegiatan Komunikasi dalam Pengawasan.....107

d. Hasil Pembangunan 109

2. Faktor - Faktor Penentu Dalam Proses Komunikasi

Pembangunan Desa 113

a. Faktor Pendukung Komunikasi 113

b. Faktor Penghambat Komunikasi 115

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 118

A. Kesimpulan 118

B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Data Luas Penggunaan Tanah Di Desa Tegalondo	42
2	Data Kependudukan Desa Tegalondo	43
3	Data Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	46
4	Data Jumlah Penduduk Menurut Agama	47
5	Data Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	48
6	Data Sarana Dan Prasarana	49
7	Data Aparatur Pemerintahan Desa Tegalondo	51
8	Data Komunikasi Tidak Langsung Pada Perencanaan Pembangunan	61
9	Data Komunikasi Pada Pelaksanaan Pembangunan	65
10	Data Bentuk Komunikasi Langsung Pada Pengawasan Pembangunan	69
11	Data Pembangunan Desa Tegalondo 2010-2011	71

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Peta Desa Tegalondo	41
2	Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pada waktu itu telah berhasil dibentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang bebas dan berdaulat, dengan suatu tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara lahiriah dan batiniah.

Pembangunan adalah sebuah cara mutlak yang dilakukan oleh sebuah negara dalam mengisi kemerdekaan. Di Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam alenia keempat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan tercermin dalam pengamalan pada sila ke lima dalam Pancasila, yaitu *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* yaitu peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pentingnya pembangunan masyarakat pedesaan dan besarnya perhatian pemerintah dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan yang mantap, rencana pembangunan yang didasarkan pada kemampuan yang dimiliki dewasa ini. Rencana yang baik adalah disusun atas dasar kenyataan, keterangan yang konkrit, penerangan yang jelas dan adanya suatu komunikasi yang baik antara perencana pembangunan dan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas-tugas pembangunan tersebut, mereka beraksi, berinteraksi dan berkomunikasi. Bahkan lebih dari 70% hari kerja para aparatur pemerintahan dipergunakan untuk melakukan kegiatan komunikasi. Sehingga komunikasi yang efektif menjadi faktor yang penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi baik organisasi pemerintahan maupun bisnis. Bahkan komunikasi organisasi disebut sebagai darah bagi kehidupan organisasi. Menurut Emerson, "Komunikasi yang dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh komunikator adalah komunikasi yang dikatakan efektif" (Sunarjo, 1995 : 72-73).

Sejalan dengan hal tersebut, disebutkan pula pada bagian lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 yakni

"Pembangunan berbasis teknologi informasi dan media massa sebagai wahana informasi dan komunikasi timbal balik antara sesama warga masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah. Diarahkan untuk menggelorakan semangat kemajuan bangsa, meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional."

Membangun dan memelihara sistem komunikasi yang efektif tersebut adalah fungsi pokok eksekutif perusahaan atau organisasi (Andre Hardjana, 2000:34). Untuk dapat mengetahui apakah kegiatan atau program komunikasi yang dilakukannya itu efektif atau tidak serta untuk mengukur kinerja dan kualitas eksekutif, maka aparatur pemerintahan desa harus melakukan audit komunikasi atas proses-proses komunikasi yang terjadi dalam pembangunan desa.

Audit Komunikasi menurut Andre Harjana (2000 : 13) adalah kajian mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem komunikasi keorganisasian yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi.

Desa yang merupakan bagian dari negara tidak terlepas dari sasaran pembangunan. Untuk keperluan inilah maka kepala desa sebagai pelaksana tunggal pemerintahan desa berusaha menggunakan berbagai cara untuk menyalurkan berbagai informasi kepada masyarakat dan memberikan motivasi dan bertanggungjawab terhadap pembangunan di desa. Semua ini dilakukan karena kepala desa berkewajiban mensukseskan kegiatan tersebut. Kepala desa adalah pimpinan tertinggi di desa yang memegang kemudi pemerintahan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembangunan desanya. Karena fungsi yang demikian luas dan sangat penting ini mereka harus dapat mengimbangi kecepatan proses pembangunan atau sebaliknya justru menjadi penghambat jalannya pembangunan.

Desa Tegalondo merupakan salah satu desa di kecamatan karangploso yang mempunyai potensi ekonomi dan sumber daya alam yang cukup baik. Desa ini terletak di tengah-tengah antara Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Secara Administratif desa ini termasuk wilayah Kabupaten Malang. Potensi ekonomi desa ini cukup besar karena selain lahan pertanian yang luas, di desa ini juga terdapat universitas swasta yang cukup terkenal yakni Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan adanya hal tersebut dalam kegiatan ekonomi, mata pencaharian utama penduduk adalah bertani, selain itu

di desa ini terdapat banyak kos-kosan dan warung-warung sebagai dampak langsung dari adanya intitusi pendidikan swasta di desa ini.

Kompleksnya masalah pembangunan desa menuntut kesungguhan dari pemerintah desa untuk selalu berusaha memberikan hasil yang bermanfaat. Proses komunikasi dalam pembangunan memungkinkan pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Informasi mengenai pembangunan harus dikomunikasikan oleh kepala desa kepada perangkat desa, LPMD dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai dasar perencanaan yang matang. Setiap tahun Desa Tegalgondo selalu melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa yang dilakukan tidak terlepas hanya dengan pembangunan fisik tetapi juga mencakup pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Kajian analisis komunikasi yang mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan proses komunikasi dalam pembangunan desa, khususnya antara kepala desa dengan masyarakat merupakan suatu proses yang bergerak timbal balik. Disatu sisi, komunikasi dalam pembangunan akan menunjukkan berbagai kegiatan yang yang harus dijalankan oleh suatu desa dan ini selanjutnya menjadi tugas yang harus dipikul oleh pemerintah desa dalam usaha menciptakan pembangunan nasional. Tetapi disisi lain, pemerintah desa dapat pula menerima amanat dari pemerintah di atasnya tentang proyek-proyek yang sebaiknya dilakukan di desa tersebut. Audit yang dilakukan bertujuan untuk menyingkap kemacetan-kemacetan informasi, hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif dalam proses pembangunan, dan peluang-

peluang yang perlu untuk dilaksanakan sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak berkepentingan yang lain.

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa betapa pentingnya suatu informasi dan komunikasi bagi kehidupan suatu bangsa dan negara yang sedang membangun. Untuk dapat mengetahui apakah kegiatan atau program komunikasi yang dilakukannya itu efektif atau tidak serta untuk mengukur kinerja dan kualitas aparatur pemerintahan desa, maka aparatur pemerintahan desa harus melakukan audit komunikasi atas proses-proses komunikasi yang terjadi dalam pembangunan desa secara berkala.

Desa yang merupakan unit terendah dalam pemerintahan, tetapi merupakan unsur penentu terhadap gagal dan tidaknya pembangunan negara. Di dalam pembangunan pedesaan pola komunikasi timbal balik antara pemerintah desa dengan masyarakatnya sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan di desa itu sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya komunikasi yang baik, serasi, dan efektif serta efisien dalam pelaksanaan pembangunan.

Berangkat dari pemikiran diatas muncul keinginan penulis untuk mengetahui pola komunikasi kepala desa dengan masyarakat dalam rangka pembangunan desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Audit Komunikasi Dalam Pembangunan Desa**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hasil audit pada proses komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan di Desa Tegalgondo, Kabupaten Malang?
- b. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses komunikasi bagi pembangunan di Desa Tegalgondo, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, selanjutnya penelitian ini secara umum bertujuan:

- a. Mengetahui dan menganalisis komunikasi pembangunan serta menerapkan konsep audit komunikasi dalam komunikasi pembangunan di Desa Tegalgondo, Kabupaten Malang yang dilakukan oleh kepala desa
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses komunikasi bagi pembangunan di Desa Tegalgondo, Kabupaten Malang

D. Manfaat yang diharapkan

- a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman yang menarik karena penulis sangat tertarik untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi dalam pembangunan sehingga diharapkan dapat

memperluas wawasan penulis tentang komunikasi-komunikasi yang terjadi dalam mewujudkan pembangunan di pedesaan.

b. Bagi perkembangan ilmu Adminitrasi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan kinerja komunikasi dalam pembangunan, khususnya mengenai komunikasi dalam pembangunan yang terjadi di desa.

c. Bagi perkembangan masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang belum mengetahui banyak mengenai audit komunikasi, sehingga mereka bisa membuka mata, hati dan pikiran mereka bahwa audit komunikasi diperlukan untuk memperbaiki atau sebagai rencana kerja dalam perbaikan organisasi ke depannya.

E. Sistematika Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penelitian tentang Audit Komunikasi Pembangunan Desa (Studi Tentang Audit Komunikasi Pada Proses komunikasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang), perumusan masalah yang terdiri dari Proses Komunikasi Kepala Desa Dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi Tentang Audit

Komunikasi Pada Proses komunikasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang), tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab 2 Kajian Pustaka

Menjelaskan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Audit Komunikasi, Komunikasi, Administrasi Pembangunan, Pembangunan Desa, dan Pesan Pembangunan Desa.

Bab 3 Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode penelitian termasuk didalamnya jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya yaitu Proses komunikasi Kepala Desa dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa yang dibedakan menjadi tiga tahapan yakni Komunikasi Pada Perencanaan, Komunikasi pada pelaksanaan, dan Komunikasi pada Pengawasan, serta faktor - faktor penentu dalam komunikasi Kepala Desa dengan masyarakat dalam pembangunan desa (Studi Tentang Audit Komunikasi Pada Proses komunikasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). Sumber data diperoleh dari informan, dokumen, dan peristiwa. Teknik pengumpulan data melalui interview/wawancara, observasi dan dokumentasi.

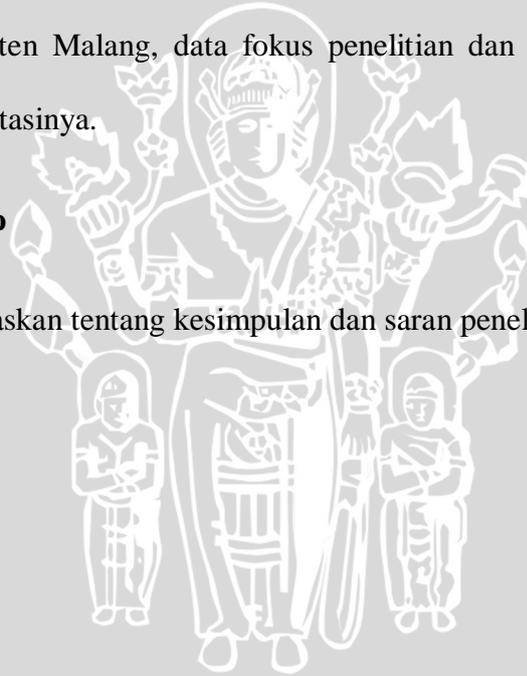
Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, pedoman, wawancara, catatan lapangan dan alat pendokumentasian. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yang bertujuan untuk membuat analisis dari pesan-pesan yang ada dalam dokumen maupun hasil wawancara dalam audit komunikasi

Bab 4 Hasil Dan Pembahasan

Menjelaskan tentang pengkajian data yang menguraikan tentang gambaran umum Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, data fokus penelitian dan analisis data serta interpretasinya.

Bab 5 Penutup

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Audit Komunikasi

1. Pengertian Audit

Dalam Bahasa Indonesia istilah audit lazimnya dihubungkan dengan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat kata audit dengan dua pengertian, yang semuanya berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan dan berbunyi sebagai berikut :

“pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (pabrik, bank, dsb.) dan pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya.

Pengertian yang sama tentang audit laporan keuangan dalam definisi baku yang dibuat oleh American Accounting Association (1973: 2) berbunyi sebagai berikut :

“A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and event to ascertain the degree of correspondence between these assertions and established criteria and communicating the result to interested users.proses sistematis dalam perolehan dan penilaian secara obyektif atas bukti-bukti berkenaan dengan pernyataan tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kecocokan antara pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria baku, serta pengkomunikasian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak penguasa yang berkepentingan.”

Dari definisi baku di atas dapat dicatat beberapa hal penting : *pertama*, audit adalah sebuah proses yang sistematis, artinya auditor memeriksa dan menguji data yang ada secara terencana, teratur, dan metodologis; *kedua*, audit

adalah perolehan dan penilaian secara obyektif atas bukti-bukti, artinya audit merupakan sebuah penelitian atau pemeriksaan empiris yang independen; *ketiga*, audit adalah penentuan tingkat kecocokan antara pernyataan dengan kriteria-kriteria yang mapan, artinya audit merupakan wujud dari penentuan atau penilaian profesional dengan kriteria yang sudah baku; dan *keempat*, audit dilengkapi dengan pengkomunikasian hasil-hasilnya kepada semua pihak pengguna yang berkepentingan yang berarti bahwa hasil evaluasi itu menjadi terbuka bagi pihak-pihak yang seharusnya mengetahuinya.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapatlah kiranya diambil suatu kesimpulan bahwa audit atau pemeriksaan hakekatnya dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.

2. Pengertian Komunikasi

Berdasarkan asal usul katanya (etimologi) istilah komunikasi atau *communicaton* berasal dari bahasa latin *communis* yang berarti sama. *Communico, communicatio* atau *communicare* yang berarti membuat sama.

Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu

dengan yang lainnya (*communication depends on our ability to understand one another*).

Dengan demikian komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Komunikasi berarti suatu usaha membentuk kebersamaan yaitu membentuk konsepsi yang sama.

Dalam Kamus Administrasi oleh The liang Gie (1968: 58-59) disebutkan bahwa komunikasi adalah :

“Suatu proses penyampaian berita dari sumber berita ke suatu tempat tujuan. Sumber berita dan tempat tujuan dalam proses komunikasi ini berupa pikiran manusia untuk uraian, uraian suatu hal, atau kesan-kesan. Wujud berita itu dapat merupakan perintah, permohonan, pernyataan, ataupun pertanyaan yang lain. Sedang sistem yang dipergunakan dalam penyampaian itu dapat berupa sistem penglihatan, sistem pendengaran atau kombinasi kedua sistem tersebut. Istilah komunikasi menghubungkan tempat-tempat, misalnya dijalan, telegram, telepon dan sebagainya.”

Dari pengertian tersebut diatas dapatlah kiranya diambil suatu kesimpulan bahwa komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian berita dari seseorang (sumber berita), kepada orang lain (tujuan berita), dengan maksud agar orang tersebut mengerti isi berita yang disampaikan. Sedang wujud berita itu dapat berupa keterangan, ide/pikiran, penyampaian sikap, perintah, uraian suatu hal, kesan-kesan, permohonan pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan yang lain.

Adapun cara komunikasi itu sendiri dapat dibagi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Lebih lanjut mengenai pembagian

komunikasi langsung dan tidak langsung ini seperti dikatakan oleh Oemi Abdulrachman (1975: 78) bahwa :

“Pesan dalam komunikasi itu dapat dilakukan secara langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Secara langsung adalah bertatap muka langsung (*face to face communication*), dan secara tidak langsung adalah dengan melalui : radio, TV, surat kabar dan sebagainya”.

Atas dasar pengertian diatas, maka komunikasi langsung adalah suatu proses penyampaian pesan/berita dari seseorang kepada orang lain dan proses penyampaiannya dilakukan dengan tatap muka, artinya antara pengirim pesan dan penerima pesan langsung berhadapan/berdialog.

Sedang yang dimaksud komunikasi tidak langsung adalah proses penyampaian pesan/berita dari seseorang kepada orang lain yang proses penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan saluran baik secara mekanis maupun secara tidak mekanis.

Dari pengertian-pengertian tentang komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung pada hakekatnya komunikasi secara luas mengandung beberapa unsur yaitu :

1. Pengirim Pesan
2. Pesan
3. Media / Saluran
4. Penerima Pesan
5. Pengaruh / Tujuan Akhir

Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan bila hanya ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang tertentu oleh si pengirim pesan bisa dilakukan komunikasi antar pribadi, tetapi bila pesan itu ditujukan kepada orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat, maka pengirim pesan memerlukan penggunaan media massa sebagai saluran pesan komunikasi tersebut. Hal ini lazim disebut dengan komunikasi massa. Pembagian komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa ini dapat dilihat seperti yang dikemukakan Iskandar Aliyabhana (1974: 15) bahwa :

“Komunikasi mencakup semua cara untuk menyebar luaskan berita pengetahuan, pikiran-pikiran, nilai-nilai dan sikap hidup kepercayaan dan lain-lainnya. Cara penyebarluasan Ini dapat dilaksanakan melalui media tertulis seperti koran, majalah, dan buku, sedangkan melalui media massa modern seperti televisi dan internet maupun komunikasi antar perorangan melalui ceramah-ceramah ataupun desas-desus di pasar dan di warung kopi.”

Pada hakekatnya komunikasi antar pribadi yang menjadi sumber dan saluran komunikasi adalah pemakrasa komunikasi itu sendiri, sedangkan komunikasi massa menggunakan media massa sebagai alat penyebarluasan berita dengan maksud untuk mencapai penerima yang banyak. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Drs. Eduarad Depari dan Dr. Colin Mac Andrews dari Everett F. Rogers (1985: 16-17) bahwa :

“Komunikasi dari mulut kemulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi disebut dengan komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi yang menjadi saluran maupun sumber komunikasi adalah pemakrasa komunikasi. Saluran mass media adalah semua alat penyampai pesan-pesan yang melibatkan mekanisme untuk mencapai audience. Film dan televisi merupakan alat yang memungkinkan sumber informasi yang menjangkau audience dalam jumlah besar dan tersebar luas. ”

Dalam kategori komunikasi massa yang termasuk cara yang dapat mengirimkan pesan-pesan kepada sejumlah penduduk dalam waktu yang bersamaan adalah : Radio, TV, surat kabar, majalah-majalah, film-film, poster-poster, buku-buku, internet dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara tatap muka, dengan arus pesan timbal balik/dua arah. Karena antara pemberi pesan langsung berdialog dengan penerima pesan, maka tingkat umpan balik yang terjadi cenderung tinggi, kemampuan mengatasi tingkat selektifitas tinggi. Selanjutnya jangkauan terhadap audience relatif kecil, sedangkan efek yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap. Adapun yang disebut dengan komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan media massa untuk mencapai jumlah penerima pesan yang besar. Dalam komunikasi massa ini antara pemberi pesan dan penerima pesan tidaklah langsung berdialog melainkan pesan yang disalurkan lewat media massa, oleh karena itu tingkat umpan balik cenderung rendah, arus pesan searah, kemampuan mengatasi tingkat selektifitas bagi masyarakat relatif besar dan efek yang mungkin akan terjadi adalah penambahan pengetahuan.

Dengan demikian antara komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa terdapat keuntungan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu didalam segala kebutuhan yang bersangkutan paut dengan penyampaian pesan hendaknya diadakan pemilihan yang tepat atas jenis komunikasi seperti yang disebutkan diatas. Selain itu terdapat pula segi-segi keuntungan dari masing-masing jenis

komunikasi antara lain : keuntungan komunikasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi ini lebih mudah dilakukan dari pada komunikasi massa, karena menyampaikan pesan secara langsung dan tatap muka lebih mudah diterima oleh penerima pesan, sedang komunikator yang menyampaikan pesan kepada ribuan pribadi yang berbeda pada saat yang sama, tidak akan bisa menyesuaikan harapannya untuk memperoleh tanggapan mereka secara pribadi.

Sedangkan komunikasi massa tertentu mempunyai keuntungan pula untuk dapat berkomunikasi dengan generasi yang akan datang. Hambatan waktu dapat diatasi dengan menggunakan media, buku, artikel, internet, dan lain-lain. Kesemua hal tersebut memungkinkan orang berkomunikasi dengan generasi-generasi berikutnya. Akan tetapi agar komunikasi itu lebih efektif sebaiknya digunakan pula komunikasi antar pribadi untuk melengkapinya.

3. Pengertian Audit Komunikasi

Istilah audit komunikasi mulai diperkenalkan oleh George Odiorne melalui karya klasiknya, "An Application of Communication Audit" yang diterbitkan dalam jurnal *Personal Psychology* 7 (1954: 235-243). Audit komunikasi tersebut berkaitan dengan pemeriksaan, evaluasi dan pengukuran secara cermat dan sistematis. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan atau program komunikasi yang dilakukan oleh staf maupun eksekutif dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat diukur, diperiksa dan dievaluasi sehingga efektifitas dan maupun efisiensi kegiatan komunikasi yang sudah dilakukan

dapat di ketahui untuk kemudian hari ditingkatkan. Sedangkan Gerald Goldhaber, seorang tokoh kunci dalam komite ICA (International Communication Association), seperti yang dikutip oleh Andre Hardjana (2000: 9-10) menjelaskan audit komunikasi sebagai “pemeriksaan diagnosis yang dapat memberikan informasi dini untuk mencegah kehancuran kesehatan organisasi yang lebih besar”. Istilah Communication Audit yang diterjemahkan menjadi audit komunikasi diberi arti yang sejalan dengan definisi marketing audit maupun organizational audit.

Selanjutnya menurut Howard Greenbaum (1974: 739) definisi audit komunikasi adalah :

“Komunikasi A Conceptual and methodological structure which in used or examination of communication processes in organization....sebuah struktur konseptual dan methodologis yang digunakan untuk pemeriksaan.”

Definisi-definisi diatas tidak menunjukkan secara operasional dari audit komunikasi. Sebuah definisi sederhana tetapi jelas tentang konsep audit komunikasi dikemukakan oleh Jane Gibson dan Richard Hodgetts (1991: 453), yaitu :

“Audit komunikasi adalah suatu analisis yang lengkap atas sistem-sistem komunikasi internal dan eksternal dari suatu organisasi. Ruang lingkup audit komunikasi dapat mneliputi rentangan dari sekedar pertimbangan atas salah satu divisi sampai ke iklm organisasi secara keseluruhan; rentang lingkungan tersebut bergantung pada mandat dan kepentingan pimpinan puncak organisasinya.”

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit komunikasi adalah kajian analisis komunikasi yang mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem komunikasi dalam organisasi yang bertujuan untuk

memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dalam organisasi. Audit yang dilakukan bertujuan untuk menyingkap kemacetan-kemacetan informasi, hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif, dan peluang-peluang yang telah disia-siakan.

a. Tujuan Audit komunikasi

Tujuan audit komunikasi menurut Gerald Goldhaber (1990: 558) secara umum dibedakan menjadi dua macam, yakni :

- 1) Sebagai Alat Diagnosis, audit komunikasi dianggap sama dengan pemeriksaan kesehatan (medical checkup) yang harus dilakukan secara periodik agar dapat memberikan manfaat sebagai upaya-upaya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan tidak secara tegas menunjukkan peningkatan kesehatan, tetapi mempunyai implikasi bahwa audit komunikasi sebagai checkup perlu dilakukan tanpa menunggu sampai organisasinya sakit terlebih dahulu. Singkatnya tujuan audit sebagai sebuah diagnosis lebih menekankan “menjaga efektivitas” dan “meningkatkan efektivitas organisasi.”
- 2) Sebagai Riset Evaluatif, dalam melakukan audit pada dasarnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data tentang sistem dan praktek komunikasi dalam organisasi, dan menunjukkan kondisi dan nilai yang digunakan sebagai kerangka intepretasi atas data

yang sudah dianalisis tanpa melengkapi rekomendasi dan rencana kerja.

Pada dasarnya tujuan pokok dari audit komunikasi sesuai definisi diatas adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem komunikasi organisasi. Dari kedua tujuan yang dipaparkan diatas, untuk kebutuhan penelitian ini, penulis mengkhususkan diri pada tujuan organisasi sebagai riset evluatif atau lebih dikenal dengan istilah model evaluasi komunikasi keorganisasian (*organizational communication evaluation*; disingkat OCE) . Model evaluasi komunikasi keorganisasian (*organizational communication evaluation*; disingkat OCE) merupakan pemeriksaan dan penilaian atas praktek dan kegiatan-kegiatan komunikasi pada situasi tertentu. Pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penulis untuk mengkhususkan permasalahan dan mendiskripsikan proses komunikasi sesuai dengan data yang sudah ada, sehingga memudahkan penulis dalam penelitian ini.

b. Unsur-unsur Dalam Audit Komunikasi

Dalam melakukan audit komunikasi ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, sebab unsur-unsur tersebut ada yang dapat mendukung dan juga sebagai penghambat. Unsur-unsur pokok audit komunikasi dalam proses pembangunan, yakni :

1. Komunikator (pemberi pesan)

Menurut Astrid S. Susanto (1975: 19) komunikator adalah individu atau kelompok orang yang menjadi pemrakarsa ataupun yang sedang

mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok (sasaran) yang lain. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan komunikator dalam penulisan ini adalah bisa individu, kelompok, suatu badan atau organisasi yang menyampaikan pesan. Sebagai komunikator hendaknya mampu melakukan perubahan sikap melalui mekanisme dan daya tarik yang mereka miliki. Komunikator dapat disenangi atau dikagumi sedemikian rupa sehingga pihak komunikan akan menerima kepuasan dengan melalui kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya seorang komunikator akan sukses dalam komunikasinya, kalau ia dapat menyesuaikan isi pesan dengan memahami kepentingannya, kebutuhannya, kecakapannya, kemampuan berfikir serta kesulitan yang dihadapi dari komunikan. Namun juga bisa sebaliknya, komunikator akan gagal dalam menyampaikan komunikasinya (isi pesan) apabila tanpa memperhatikan kemampuan berfikir, kebutuhan, kecakapan serta kesulitan dari si komunikan.

2. Isi pesan

Isi pesan atau isi berita adalah istilah yang umum dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk dibatasi pengertiannya. Menurut The Liang Gie, berita adalah “segala keterangan yang disampaikan oleh pemberita kepada penerima berita”. Berita terdiri dari simbol-simbol yang mempunyai arti tertentu bagi pihak pengirim dan penerima pesan/berita. Berita/pesan dinyatakan dalam simbol bahasa atau lambang-lambang berbunyi, tetapi ada kalanya lambang-lambang tersebut sifatnya non verbal, misalnya dengan gerakan tangan, gerakan muka atau

kadang-kadang dengan menggunakan gambar-gambar. Menurut Wilbur Schram yang dikutip oleh Onong U. Effendy (1979: 46), menampilkan apa yang disebut dengan *the Condition of succesin communication*, yakni kondisi yang harus dipenuhi jika kita menginginkan agar suatu pesan membangkitkan tanggapan yang sesuai dengan yang kita kehendaki.

Kondisi-kondisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan.
- b) Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang ada antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti.
- c) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut.
- d) Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok dimana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Dengan melihat pengertian diatas, yang menjadi tujuannya ialah makna sesungguhnya dari pesan yang disampaikan diusahakan supaya disesuaikan dengan komunikan serta harus mudah ditafsirkan oleh penerima pesan sehingga komunikan dapat menangkap makna pesan.

3. Teknik Audit Komunikasi.

Audit komunikasi yang lengkap dan mendalam menggunakan lebih dari satu teknik dan metode. Hal ini terkait dengan rekomendasi yang dihasilkan yang harus dapat mengatasi masalah dan memperbaiki sistem yang ada. Masalah-masalah dalam sistem komunikasi organisasi disebabkan oleh beberapa faktor dan mempunyai pengaruh baik internal maupun eksternal sehingga membutuhkan analisis dan interpretasi multidimensional. International Communication Association telah membakukan standar pengukuran untuk audit komunikasi yang dikenal sebagai system lima alat pengukuran yang oleh Gerald Goldhaber (1990: 567) dirumuskan menjadi teknik dan metode :

- a) Survey dengan kuesioner, survey dalam ICA Audit terdiri dari 122 butir pertanyaan, termasuk 12 butir tentang ciri-ciri demografik, 34 butir tentang kebutuhan organisasi
- b) Wawancara tatap muka, tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk memeriksa, menguji atau melengkapi data yang diperoleh melalui alat ukur lain. Terdiri dari wawancara penjajakan untuk mengumpulkan informasi penting dalam rangka pengenalan masalah dan wawancara pendalaman yang disebut juga wawancara tindak lanjut untuk membantu tafsiran atas temuan yang diperoleh melalui alat audit lain.
- c) Observasi, merupakan kegiatan mengamati dan mencatat perilaku yang dapat dilakukan atas perilaku orang lain,

sebagai pengamat terlatih (*trained observer*) dan perilakunya sendiri yang disebut sebagai studi tugas (*duty study*).

Untuk mewujudkan tersampainya informasi dari pesan komunikasi secara lancar dan mudah diterima komunikan diperlukan suatu alat atau teknik di dalam melakukan kegiatan komunikasi tersebut yang meliputi bahasa dan media yang digunakan.

1. Bahasa Informasi

Bahasa dalam komunikasi yang dimaksud adalah beberapa kata-kata, kalimat-kalimat atau lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan pesan dan mempunyai arti. Mengenai pengaruh bahasa ini Ulrich Kratz (1974: 73) mengatakan bahwa :

“Pengaruh bahasa adalah langsung atas komunikasi sosial terlibat juga pada kesulitan sosial yang disebabkan oleh kemampuan dan performan. Seseorang pembicara yang tidak memadai dengan persyaratan situasi kesulitan yang terjadi menunjukkan kalau kemampuan komunikasi orang tersebut kurang baik.”

Oleh karena itu dalam proses komunikasi diperlukan kemampuan untuk dapat menyampaikan pesan tersebut dalam bentuk kata-kata, tulisan-tulisan atau lambang-lambang kemungkinan yang dapat dimengerti oleh si penerima pesan. Sebab penggunaan bahasa yang kurang tepat, disamping sulit untuk dimengerti juga akan berakibat dengan pesan yang disampaikan itu beralih dari arti yang sesungguhnya. Dengan demikian mengakibatkan isi pesan itu berlainan antara penerima dan pengirim pesan. Keberhasilan dalam

kegiatan komunikasi banyak ditentukan pula oleh formulasi pesan yang disampaikan. Ketidaktepatan memformulasikan pesan akan menimbulkan gangguan komunikasi, jadi gangguan dalam komunikasi dapat juga berasal dari bahasa yang digunakan.

2. Media

Media ialah suatu alat perantara yang dipergunakan dalam komunikasi menurut Drs.S.K. Bonar (1981: 50-51) mengatakan bahwa media yang digunakan dalam proses komunikasi ada empat macam yaitu :

- a) Media cetak ialah segala barang cetakan termasuk dalam media ini seperti surat kabar, majalah, buku brosur, pamflet, walpaper dan lain sebagainya.
- b) Media visual ialah media yang dapat dilihat seperti foto, lukisan, film, pameran, televisi., dan lain sebagainya.
- c) Media audio, ialah media yang dapat didengar seperti Radio, gramapon, tape recorder, telepon, suara film, dan sebagainya.
- d) Media pertemuan ialah segala macam pertemuan termasuk dalam media ini pertemuan antara dua orang, antara beberapa orang, rapat kecil, rapat formal atau informal, konferensi, kongres, rapat umum, dan lain sebagainya.

4. Komunikan (penerima pesan)

Istilah umum yang digunakan untuk menyebut penerima berita ialah komunikan, seperti yang dikatakan oleh Astrid S Susanto (1975: 2) bahwa “komunikan adalah individu atau kelompok yang menjadi obyek (sasaran) dari kegiatan komunikasi.”

Menurut Harsono Suwardi (1974: 3) mengutip pendapat dari Lioyd Soerlad bahwa “sering dibicarakan tentang penerima pesan atau komunikan ini adalah mengenai pendidikannya dan problem utama komunikasi adalah persoalan bagaimana menyarnpaikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada penduduk desa yang berpendidikan dan memberikan motivasi agar mereka mau menerima perubahan-perubahan dan cara-cara baru”.

Masyarakat desa yang pada umumnya berpendidikan menengah sampai rendah memerlukan penyajian pesan berlainan dengan orang-orang kota yang pada umumnya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Akan tetapi audience (masyarakat desa) yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi ada kecenderungan sulit dipengaruhi daripada audience yang mempunyai pendidikan lebih rendah. Audience yang mempunyai pendidikan tinggi pada umumnya menyukai argumen yang lebih lengkap. Sedangkan audience yang mempunyai pendidikan rendah akan menyukai pesan yang sederhana dan mudah dipahami.

c. Rencana Kerja Pelaksanaan Audit Komunikasi

Menurut Andre Hardjana (2000: 99) Sebuah rencana kerja (work plan) pada dasarnya adalah pedoman teknis untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk tujuan audit komunikasi. Sebagai pedoman audit komunikasi dapat dikatakan terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang berurutan sebagai berikut :

1) Tahap Pencarian Fakta

Pencarian fakta dapat dilakukan dengan teknik-teknik observasi, pemeriksaan dokumen, dan wawancara dengan para pejabat atau personel yang berkepentingan. Data yang dikumpulkan meliputi sejarah, gaya kepemimpinan, dan iklim organisasi (*organizational climate*). Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku komunikasi dan jenis-jenis kebijakan, kegiatan-kegiatan, dan pengendalian dalam sistem komunikasi.

2) Tahap Analisis

Dalam tahap ini, semua data yang sudah dikumpulkan dalam tahap sebelumnya diperiksa dengan tujuan untuk menentukan sejauh mana kebijakan-kebijakan komunikasi dan kegiatan-kegiatan dapat mencapai sasaran dari jaringan-jaringan utama dan organisasi itu sendiri.

3) Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan meninjau dan mempertimbangkan data hasil dari berbagai teknik dan metode riset audit komunikasi, dan kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai efektivitas dan efisiensi dari seluruh sistem komunikasi organisasi.

B. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan

Negara kita bercorak agraris, hal ini berarti bahwa kegiatan sosial ekonomi, sumber penghasilan negara dan rakyat sebagian besar terletak pada sektor pertanian/agraria. Sehubungan dengan itu maka usaha-usaha pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat desa pada khususnya harus diarahkan pada usaha-usaha peningkatan produksi dibidang pertanian/agraria yang dalam hal ini sandang dan pangan tanpa mengesampingkan perumahan. Tetapi sekalipun pembangunan masyarakat terletak pada aspek fisik material. Namun aspek spiritual tidak boleh diabaikan, ini berarti bahwa pembangunan masyarakat desa harus meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat desa, sehingga mencakup perkembangan aspek kehidupan yang lain.

Menurut pendapat Saul M. Kate yang dikutip oleh Slamet Riyadi (1986: 13), bahwa pembangunan adalah “ usaha perubahan dari suatu keadaan dalam tingkat kondisi kemasyarakatan tertentu kedalam keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang lebih baik dibidang sosial sebagaimana diinginkan.” Selanjutnya menurut pendapat, Willy Brant yang dikutip oleh Slamet Riyadi (1986: 13) mengemukakan bahwa pembangunan adalah “ proses yang menuju kepada perubahan dari seluruh struktur ekonomi dan sosial yang mampu mencakup kemajuan dalam kondisi hidup.

Kemudian menurut Slamet Riyadi (1981: 16) bahwa pembangunan adalah :

“Suatu proses dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatkan peran serta masyarakat banyak. sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan sosial / struktur sosial yang mendasar maupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat tetapi terkendalikan dalam ruang lingkup keadilan sosial demi kemajuan dan kualitas hidup dan meningkatkan harkat dan martabat manusiawi.”

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjoyo (1984: 22) mengatakan bahwa “pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus-menerus dari suatu keadaan yang dianggap lebih baik.” Dari beberapa pengertian mengenai pembangunan tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berlangsung terus-menerus serta terencana yang dilakukan secara sadar oleh manusia yang diusahakan dalam berbagai bidang kearah modernisasi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

2. Pengertian Pembangunan Desa

Pengertian desa itu sendiri antara lain menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa desa adalah :

“Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh W.J. Poerwodaminto (1976: 246) bahwa desa adalah “ Sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.” Selanjutnya menurut Soetardjo Kartohadikoesumo yang terdapat dalam bukunya CST. Kansil (1984: 80) bahwa desa adalah “suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.”

Dengan demikian maka pengertian tentang pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung, di pedesaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya dari masyarakat untuk bergotong royong. Lebih lanjut menurut Drs.CST Kansil (1984: 80) bahwa pembangunan desa adalah :

“Pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.”

Kemudian penulis kemukakan juga tentang pengertian pembangunan masyarakat desa yaitu :

“suatu usaha pembangunan dari masyarakat dan unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan dibina terus-menerus, sistematis, dan terarah pada bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha menyeluruh”.

Dari beberapa pengertian pembangunan desa maupun pembangunan masyarakat desa maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa adalah usaha-usaha dari dan untuk masyarakat itu sendiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang telah

dilakukan secara terus menerus dan mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang merupakan bagian dari keseluruhan pembangunan nasional. Dengan demikian pembangunan desa/pembangunan masyarakat akan mengandung beberapa unsur antara lain :

1. Adanya usaha kerja sama dari masyarakat desa.
2. Pemerintahan desa berkewajiban untuk membimbing, membina, memimpin dan mengkoordinasikan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa secara kontinyu.
3. Mengubah keadaan yang sudah ada menuju pada keadaan yang lebih baik.
4. Adanya usaha berdasarkan atas kemampuan masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan sendiri.

Agar segala aktivitas pembangunan di desa sebagai komponen terbawah dalam ikatan kegiatan pembangunan secara menyeluruh itu dapat diselenggarakan dengan praktis, fragmatis dan programatis, maka perlu adanya pola pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan dari pemerintah desa untuk dapat menyusun pola pembangunan desa dengan menerima inisiatif, yang positif, baik dari organisasi massa maupun dari individu yang ada di desa untuk dimusyawarahkan dalam rangka mencapai mufakat. Usaha pembangunan masyarakat tidak dapat meninggalkan sifatnya yang integral. Hal ini berarti bahwa pembangunan masyarakat desa harus meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

3. Pesan Pembangunan Desa

Pembangunan desa diharapkan dapat langsung menyentuh kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan dimana pembangunan desa merupakan salah satu titik sentral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu agar pembangunan suatu desa dapat berjalan lancar dan berhasil maka dalam kegiatan pembangunan tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat serta segenap sumber daya yang dimiliki pada desa yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat berupa partisipasi dalam bentuk materiil maupun moral.

Komunikasi untuk pembangunan desa mencakup aspek proses komunikasi, makna komunikasi, dan konteks komunikasi yang meluas. Secara umum pesan komunikasi untuk pembangunan desa, mencakup hal-hal berikut:

- a) melakukan pembahasan tentang ideologi pembangunan.
- b) melakukan hubungan interpersonal didalam kelompok dan pribadi.
- c) melakukan penyebaran ide-ide pembebasan ke media massa.

Ragam pesan dalam pembangunan desa masa kini dapat berupa desentralisasi, efisiensi sampai peran swasta dalam pendampingan. Pesan pembangunan desa akan dipraktekkan dalam bentuk benda materiil maupun interaksi sosial. Oleh karena itu masing-masing pihak yang berkomunikasi dalam pembangunan desa berupaya menyajikan pesan tertentu, yang diharapkan pesan pembangunan tersebut dapat menjadi dominan (*mainstreaming*). Disamping aspek-aspek proses komunikasi diatas konteks

komunikasi dalam pembangunan telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yakni meliputi percakapan, hubungan sosial, kelompok, organisasi, masyarakat dan budaya. Pesan-pesan pembangunan desa tidak berjalan sendiri. Sebagai upaya untuk menyajikan perubahan masyarakat yang terencana program pembangunan desa dibatasi pada pola-pola manajemen pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada proyek pembangunan.

C. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan tertinggi di desa yang memegang kemudi pemerintahan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembangunan desanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang desa menyatakan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan “ Urusan Pemerintahan “antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan “Urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana

fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pengertian diatas kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

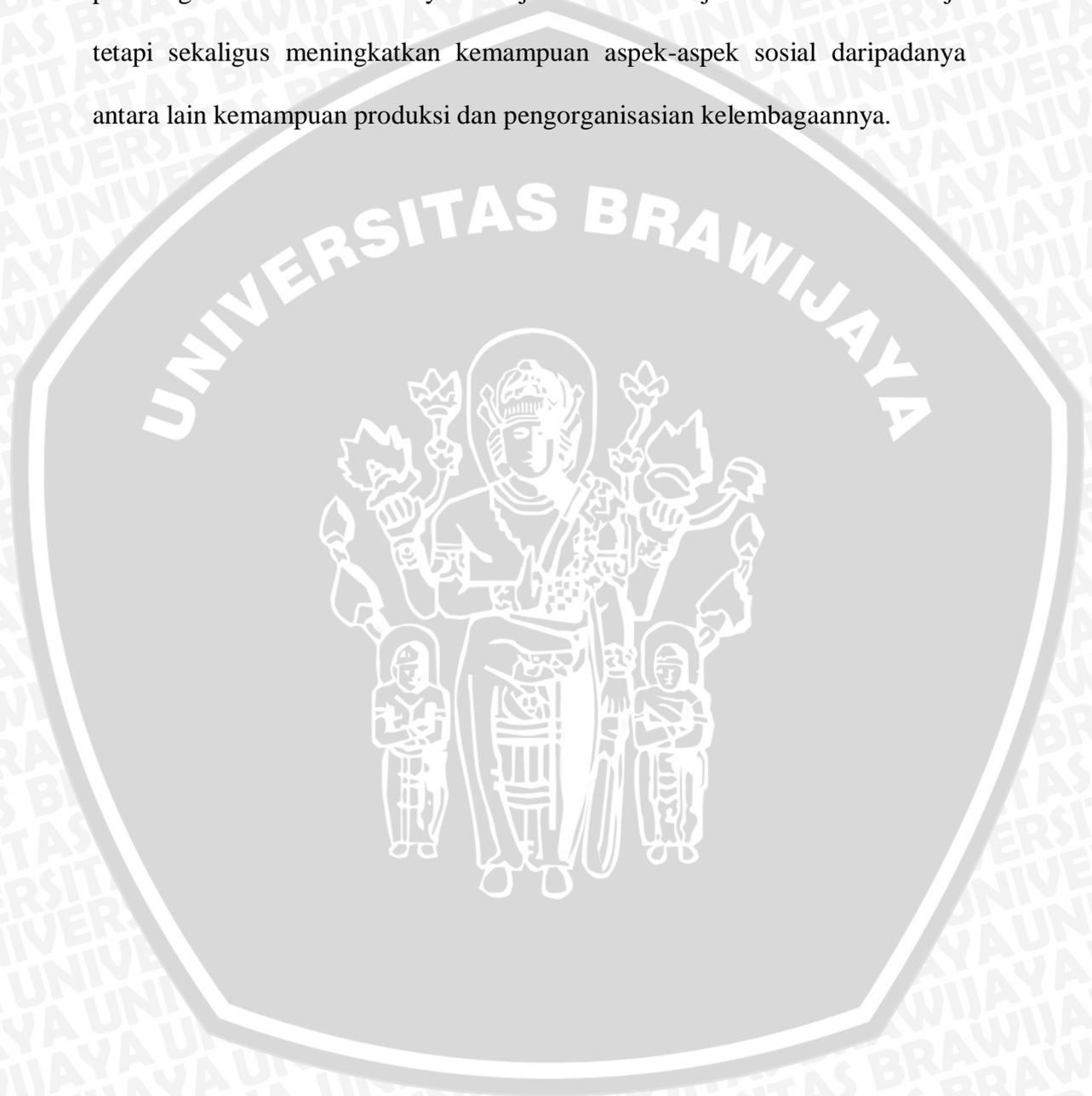
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pesan Komunikasi Kepala Desa

Perkembangan penduduk yang terus meningkat dapat menimbulkan berbagai masalah yang berarti pula akan menghambat pertumbuhan desa, kota bahkan suatu negara. Dalam rangka jangkauan ke depan, haruslah diusahakan bagaimana cara-cara untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu diperlukan pembangunan di segala bidang sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat ditentukan oleh komunikasi pembangunan yang dilakukan kepala desa. Dalam hal ini kepala desa berwenang secara partisipatif sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan. Dengan demikian sehubungan dengan kegiatan usaha pembangunan desa/masyarakat desa, kepala desa mempunyai peran dominan dalam proses pembangunan desa.

Komunikasi dalam proses pembangunan desa dibatasi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan desa pembangunan desa. Pesan komunikasi yang dilakukan kepala desa hendaknya mencakup pada ketiga proses pokok diatas. Kepala desa harus mampu menjabarkan tujuan program pembangunan desa yang dilaksanakan secara jelas dan sebelumnya telah mendapat persetujuan dari BPD (badan permusyawaratan desa).

Pesan pembangunan oleh kepala desa dapat berupa bentuk materiil maupun interaksi sosial. Oleh karena itu kepala desa dalam komunikasi pembangunan desa tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi saja tetapi sekaligus meningkatkan kemampuan aspek-aspek sosial daripadanya antara lain kemampuan produksi dan pengorganisasian kelembagaannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2009: 1).

Dalam metode penelitian ini dijelaskan tentang jenis penelitian dan alasan pemilihan jenis penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin memberikan gambaran audit komunikasi pembangunan desa dengan cara studi komunikasi pada kepala desa. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti (Nazir, 2003:54).

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Audit pada proses komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa yang dijabarkan dalam tiga tahap yakni :
 - a) Komunikasi pada Perencanaan Pembangunan
 - b) Komunikasi pada Pelaksanaan Pembangunan
 - c) Komunikasi pada Pengawasan Pembangunan
2. Faktor-faktor Penentu dalam Proses Komunikasi Pembangunan Desa
 - a) Faktor Pendukung Komunikasi dalam Pembangunan
 - b) Faktor Penghambat Komunikasi dalam Pembangunan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Malang. Sedangkan situs penelitian adalah letak atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Alasan pemilihan situs penelitian ini karena kedekatan peneliti dengan lokasi penelitian dan ketertarikan peneliti terhadap fenomena komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa dengan masyarakat yang terjadi di Desa Tegalgondo.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk pertama kalinya.

Data primer untuk pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a) Kepala Desa Tegalgondo, Bapak Drs. H. Jamil, SH.MH
 - b) Ketua LPMD Desa Tegalgondo, Bapak Husnan, ST.
 - c) Kepala Urusan Pembangunan Desa Tegalgondo, Bapak Yadi. S
 - d) Kepala Urusan Administrasi dan Umum Desa Tegalgondo, Ibu Sani. K
 - e) Kepala Seksi Pelaksana Pembangunan (TPK) LPMD Desa Tegalgondo, Bapak Agus Pranoto
 - f) Ketua Rw dan Rt Desa Tegalgondo yang diambil secara acak
 - g) Tokoh Masyarakat Desa Tegalgondo yang diambil secara acak
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek kajian yang diteliti namun diusahakan oleh pihak lain antara lain data yang berasal dari dokumen yaitu berbagai dokumentasi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Data yang digunakan antara lain :
- a) Data Monografi Desa Tegalgondo 2011
 - b) Data Potensi Desa Tegalgondo 2011
 - c) Data Kegiatan Desa Tegalgondo 2011
 - d) Data Arsip Pembangunan Desa Tegalgondo 2011

E. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Interview atau Wawancara tatap muka, tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk memeriksa, menguji atau melengkapi data yang diperoleh melalui alat ukur lain. Sedangkan jenis interview ada tiga yaitu : interview tak terkontrol, interview terkontrol, dan bebas

terkontrol. Dari ketiga jenis tersebut, penulis memilih jenis interview yang terkontrol sebab lebih memudahkan penulis dalam pelaksanaannya sehingga penulis lebih mudah menangkap informasi dari responden secara tepat.

- 2) Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala obyek yang diteliti.
- 3) Dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan mencatat arsip-arsip atau catatan resmi seperti surat-surat, artikel-artikel, film dan sebagainya.

F. Analisis Data

Menurut Andre Hardjana (2000: 99) Sebuah rencana kerja (work plan) pada dasarnya adalah pedoman teknis untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk tujuan audit komunikasi. Analisis data dalam penelitian komunikasi kualitatif pada dasarnya dikembangkan dengan maksud hendak memberi makna (making of sense) terhadap data, menafsirkan (interpreting), atau mentransformasikan pesan (transforming) data ke dalam bentuk-bentuk narasi. Dalam sebuah penelitian kualitatif, sebuah peristiwa dijelaskan secara naratif tentang bagaimana hal tersebut terjadi.

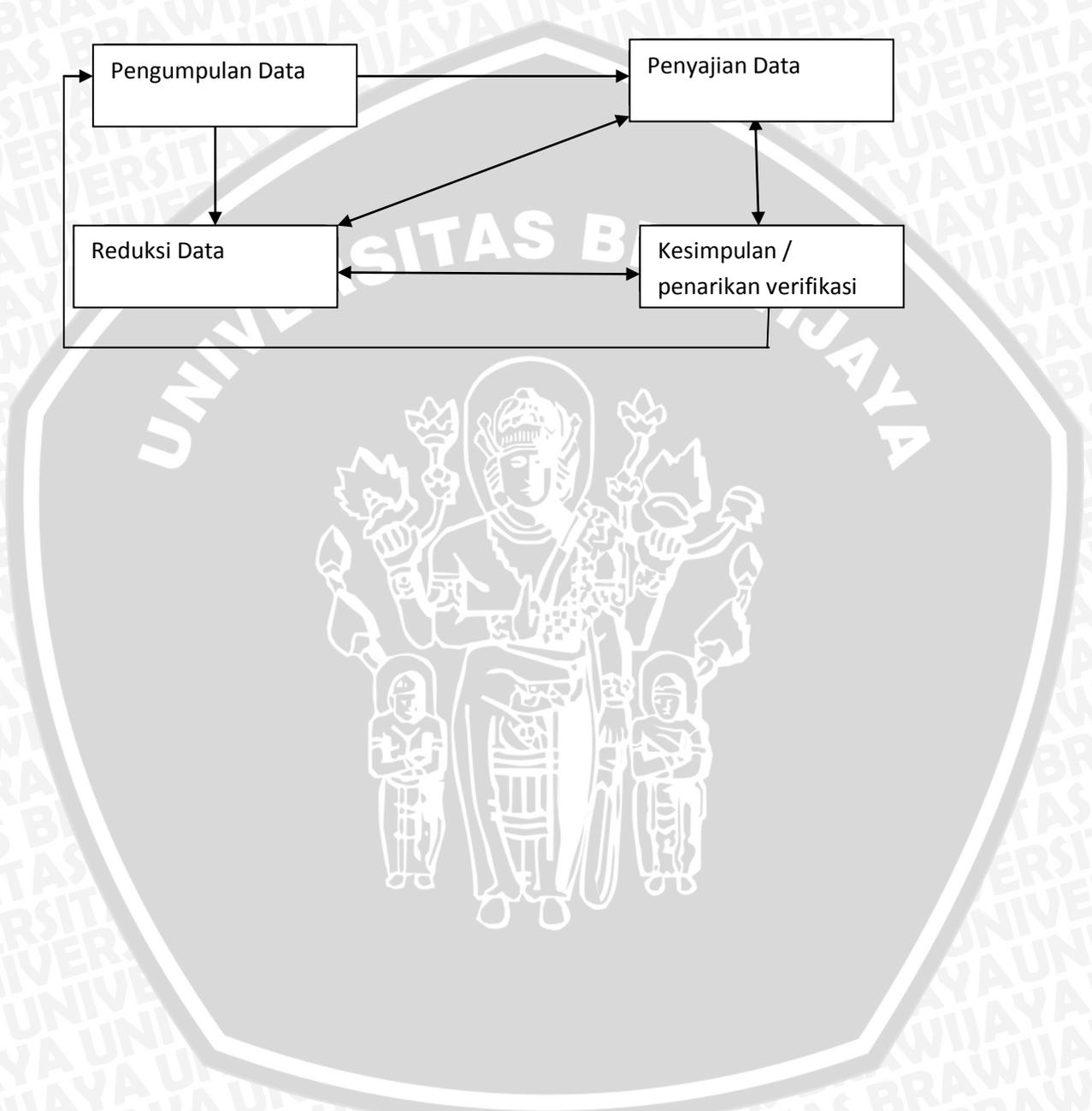
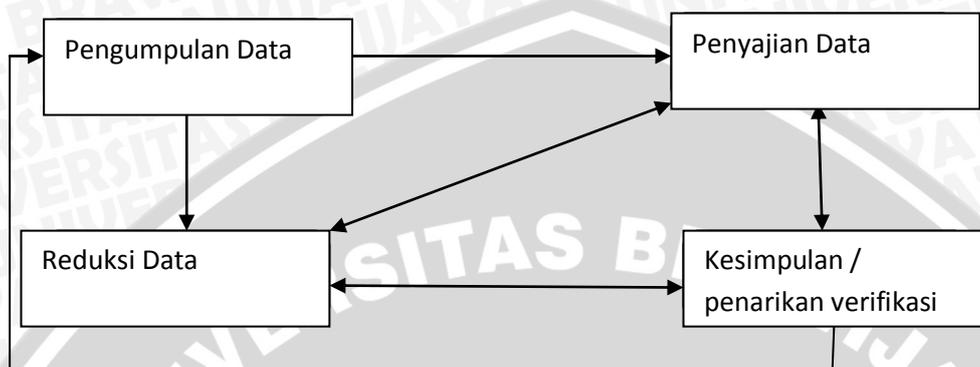
Teknik analisis kualitatif pada komunikasi pada dasarnya bertujuan untuk membuat analisis dari pesan-pesan yang ada dalam dokumen maupun hasil wawancara dalam audit komunikasi, teknik analisis ini umumnya memberikan manfaat untuk tiga kegiatan, yakni :

- a) Membuat paparan tentang apa, bagaimana, dan kepada siapa komunikasi dinyatakan
- b) Membuat inferensi tentang anteseden mengenai sebab musabab mengapa suatu komunikasi dinyatakan
- c) Membuat inferensi tentang apa dampak dari komunikasi yang dinyatakan itu.

Adapun tahap-tahap analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2009, hal:91-92), sebagai berikut :

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian “kasar” yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Dalam reduksi ini, data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap. Kemudian laporan itu akan direduksi, dirangkum dan diseleksi hal-hal pokok, kemudian dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data, merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk dapat memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, sehingga dengan melihat penyajian dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan verifikasi data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan.

Gambar Metode Analisis Data Kualitatif dalam Komunikasi



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Tegalgondo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Desa Tegalgondo mempunyai ketinggian 580 m di atas permukaan air laut. Topografi Desa Tegalgondo berupa dataran yang tanahnya relatif subur untuk persawahan dan budidaya pertanian lainnya. Luas Desa Tegalgondo secara keseluruhan adalah 220.235 ha.

Desa Tegalgondo secara geografis berbatasan dengan :

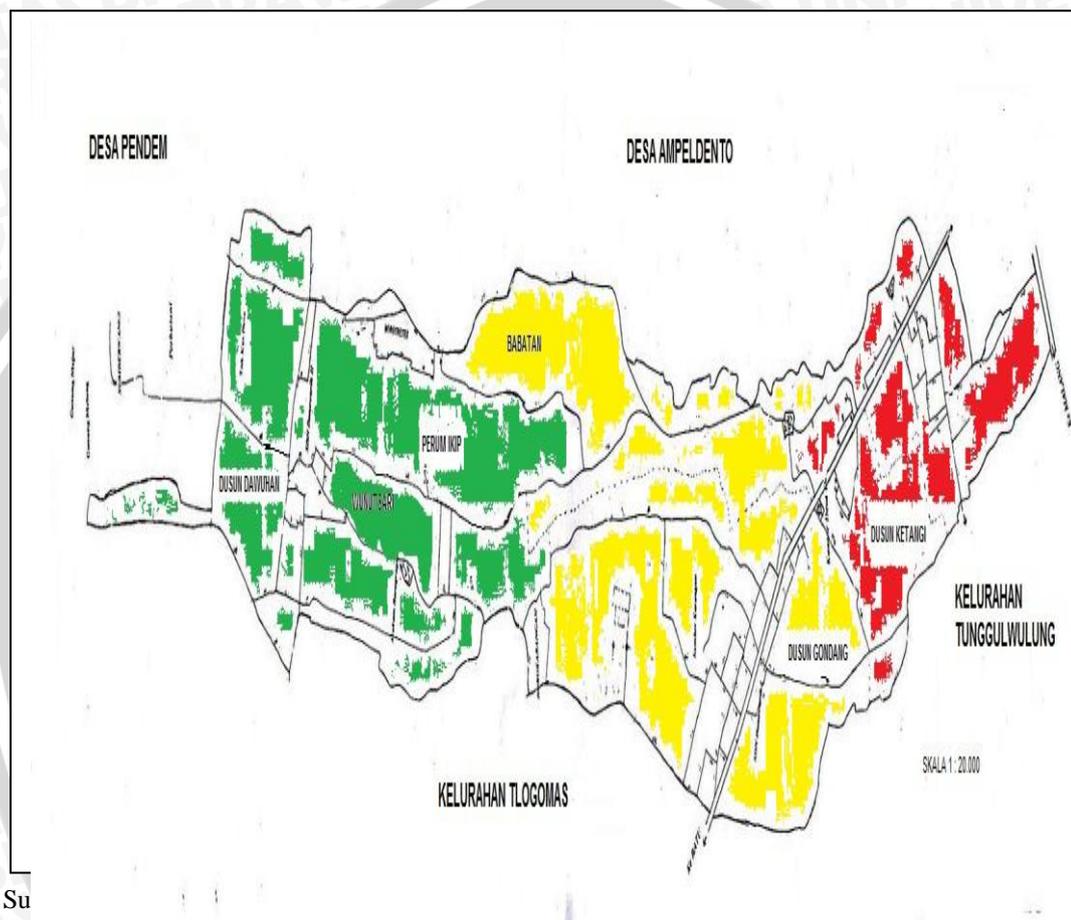
- 1) Sebelah utara : Desa Ampeldento
- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Tlogomas
- 3) Sebelah barat : Desa Pendem
- 4) Sebelah Timur : Kelurahan Tunggulwulung

Kabupaten/Kota 8 Km. Desa tegalgondo terbagi menjadi 3 pedukuhan, 28 RT dan 9 RW. Perincian dusun tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dusun Ketangi
- 2) Dusun Gondang dan babatan
- 3) Dusun Dawuhan, wunutsari, dan Perum IKIP

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat peta Desa Tegalgondo pada Gambar 1 berikut :

PETA DESA TEGALGONDO



Sebagaimana umumnya desa yang ada di Kabupaten Malang penggunaan tanah lebih banyak tertuju pada sektor pertanian. Hal ini juga berlaku di Desa Tegalgondo, dimana lahan pertanian yang ada berbentuk persawahan dan ladang. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan dan pemanfaatan yang ada di Desa Tegalgondo dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

LUAS PENGGUNAAN TANAH DI DESA TEGALGONDO TAHUN 2011

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Pemukiman	1,956	1,40 %
2	Sawah dan ladang	62	40,13 %
3	Jalan	6,6	4,73 %
4	Bangunan	23,27	16,69 %
5	Pekuburan	3	2,15 %
6	Pekarangan	32	20,45 %
7	dll	10,37	4,45 %
	Jumlah		100 %

Sumber : Data Potensi Desa Tegalondo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah di Desa Tegalondo sebagian besar untuk persawahan, disamping itu juga untuk pemukiman, pekarangan dan ladang, bangunan, pekuburan, dll. Perumahan penduduk rata-rata mempunyai pekarangan. Selain itu, sawah dan ladang banyak dijumpai di Desa Tegalondo, namun pada perkembangannya akan semakin sempit karena digunakan untuk pemukiman/perumahan.

2. Keadaan Demografis

Desa Tegalondo berpenduduk 5692 jiwa terdiri dari 1659 kepala keluarga (kk) dengan perincian menurut jenis kelamin yaitu : 2976 jiwa laki-laki dan 2776 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA TAHUN 2011

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	
0 Bln – 12 Bln	111	113	254
13 Bln – 4 Thn	122	136	258
5 Thn – 6 Thn	162	179	341
7 Thn – 12 Thn	365	379	744
13 Thn – 15 Thn	125	133	258
16 Thn – 18 Thn	289	106	495
19 Thn – 25 Thn	196	117	313
26 Thn – 35 Thn	106	127	233
36 Thn – 45 Thn	236	277	513
46 Thn – 50 Thn	387	216	603
51 Thn – 60 Thn	121	152	374
61 Tahun keatas	168	199	367
Jumlah	2776	2776	5692

Sumber : Data Potensi Desa tegalgondo

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandngan antara usia produktif dan usia non produktif di Desa Tegalgondo sebagai berikut :

a) Kelompok Usia produktif

Kelompok usia 15 – 50 tahun = 3589 jiwa

b) Kelompok Usia Non Produktif

Kelompok usia 0 – 14 = 512 jiwa

Kelompok usia 50 tahun keatas = 1392 jiwa

Jadi total usia non produktif yaitu 512 jiwa + 1392 jiwa = 1904 jiwa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Desa Tegalgondo memiliki jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif dengan perbandingan sebesar 66,07 % dan 33,23 %. Sesuai pengamatan penulis jumlah usia produktif ini sudah sepenuhnya dimanfaatkan dalam pembangunan. Hal ini terlihat dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab mereka mempunyai inisiatif untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses perencanaan, pelaksanaan sekaligus pengawasan pembangunan.

3. Keadaan Sosial Budaya

Dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa walaupun Desa Tegalgondo terletak di pinggiran kota Malang, namun kehidupan masyarakatnya masih bercorak kehidupan tradisional. Dimana gaya kehidupan pertanian masih melekat dalam diri setiap penduduk. Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Tegalgondo dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut ini :

a. Adat Istiadat

Tata kehidupan masyarakat Desa Tegalgondo masih terikat pada tradisi lama.

Ini ditemukan dalam pergaulan sehari-hari yang masih menunjukkan ciri-ciri-

kehidupan masyarakat desa seperti gotong royong, semangat kekeluargaan, serta pengaruh tokoh masyarakat yang masih kuat. Ciri-ciri kehidupan ini semakin tampak dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, pembangunan tempat ibadah, pembangunan rumah penduduk, pesta perkawinan, kematian dan kegiatan sosial lainnya

b. Pendidikan

Menurut pengamatan penulis, tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Desa Tegalgondo adalah menengah kebawah. Ini sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakatnya yang cukup baik. Dengan kondisi penduduk yang demikian akan mempermudah masyarakat untuk menerima inovasi-inovasi dalam rangka mencapai suatu taraf kehidupan yang lebih baik. Kemajuan masyarakat dalam sektor pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersediannya sarana dan prasarana pendidikan.

Dari data profil Desa Tegalgondo tahun 2011 diketahui bahwa terdapat 1 buah PAUD dan 2 buah TK, dengan jumlah murid 213 orang dan jumlah guru 11 orang. Sedangkan untuk SD terdapat 2 buah sekolah dasar dengan jumlah murid 825 orang dan guru sebanyak 42 orang. Sarana dan prasarana di Desa tegalgondo cukup memadai. Jumlah gedung sekolah dari TK sampai SD sudah dapat menampung sebagian masyarakat yang termasuk dalam kelompok pendidikan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Tegalgondo dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2011

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	SD/Sederajat	455	8,43 %
2	SLTP/ sederajat	1.480	25,54 %
3	SLTA/ sederajat	2.850	49,60 %
4	Akademi (D1, D2, D3)	257	4,51 %
5	Sarjana (S1, S2, S3)	697	11,92 %
	Jumlah	5.696	100 %

Sumber : Data Potensi Desa Tegalgondo

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tegalgondo termasuk tinggi, dimana jumlah masyarakat yang tamatan SLTA memiliki prosentase tertinggi yaitu sebesar 49,60 %. Sedangkan untuk tamatan SD sebesar 8,43 %. Disamping itu tamatan sarjana juga sudah cukup banyak yaitu sebesar 11,92 %. Masyarakat Desa Tegalgondo menyadari pentingnya pendidikan, didukung oleh tongkat perekonomian yang cukup tinggi dan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

c. Agama

Selanjutnya jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA TAHUN 2011

No	Agama	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Islam	5.154	98,30 %
2	Kristen	131	0,80 %
3	Katolik	42	0,24 %
4	Buddha	3	0,02 %
	Jumlah	5.333	100 %

Sumber : Data Potensi Desa tegalgondo

Dari data pada tabel 4 tersebut dapat diketahui bahwa kelompok agama yang ada di Desa Tegalgondo terdapat 4 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Buddha. Sedangkan dari kelompok agama yang ada tergambar bahwa sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam yaitu sebesar 98,30 %, agama Kristen 0,80 %, agama Katholik 0,24 % dan agama buddha 0,02 %. Mengenai toleransi kerukunan antar umat beragama di Desa Tegalgondo sangat tinggi, dimana masing-masing pemeluk agama dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan aman serta peran tokoh agama sangat besar pengaruhnya terhadap segala kegiatan pembangunan di Desanya.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Tegalgondo adalah wiraswasta, selainnya sebagai petani, PNS, pensiunan, dll. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN TAHUN 2011

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Petani	92	1,8 %
2	PNS	102	2,54 %
3	TNI/POLRI	24	0,72 %
4	Guru	52	1,07 %
5	Pedagang	126	2,73 %
6	Jasa		
	a. Bidan	5	0,45 %
	b. Tukang Kayu	201	6,1 %
	c. Tukang Batu	267	6,82 %
	d. Buruh	286	7,03 %
	e. Sopir	29	0,76 %
	f. Tukang Becak	5	0,45 %
	g. Tukang Jahit	8	0,51 %
7	Pensiunan TNI/POLRI/SIPIL	321	16,9 %
8	Wiraswasta	613	23,7 %
9	Lain-lain	1587	49,20 %
	Jumlah	3016	100 %

Sumber : Data Potensi Desa Tegalondo

Catatan : Lain-lain adalah dokter, satpam, peternak, tukang ojek, pegawai swasta.

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tegalondo bermata pencaharian Wiraswasta sebesar 23,7 % berjumlah 613

orang. Disamping itu sebagai pensiunan TNI/POLRI/SIPIL sebesar 16,9 % dengan jumlah 321 orang, pedagang 5,73 % berjumlah 126 orang, guru 1,07 % berjumlah 52 orang, TNI/POLRI 0,72 % berjumlah 24 orang, petani 1,8 % berjumlah 92 orang. Penduduk yang bermata pencaharian di bidang jasa (bidan, tukang batu, buruh, tukang kayu, sopir, tukang becak, tukang jahit) sebesar 20,76 % berjumlah 801 orang. Lain-lain sebagai pengrajin, dokter, satpam, peternak, tukang ojek, dan pegawai swasta sebesar 49,20 % berjumlah 1587 orang.

5. Keadaan sarana dan prasarana

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tegalgondo hingga saat ini banyak memberikan hasil yang cukup memuaskan dan dapat dirasakan manfaatnya. Untuk lebih jelasnya dalam tabel 6 berikut ini akan disajikan jumlah sarana/prasarana Desa Tegalgondo.

SARANA DAN PRASARANA DESA TEGALGONDO 2011

No	Sarana/prasarana	Jenis	Jumlah
1	Rumah Ibadah	Masjid, Musholla	32
2	Pendidikan	PAUD, TK, SD	9
3	Olehraga	Sepakbola, Voli, tenis meja	6
4	Ekonomi	Pasar Desa	1
5	Perhubungan	Jalan Desa, Jembatan	8
6	Komunikasi	Telepon, Parabola	5112
7	Transportasi	Sepeda Motor, mobil, dll	3558

Sumber : Data Potensi Desa Tegalgondo

Berdasarkan tabel diatas, hingga tahun 2011 jumlah masjid di Desa Tegalgondo ada 4 buah, musholla ada 28 buah. Gedung pendidikan untuk PAUD ada 3 buah, TK ada 3 buah, dan SD/MI ada 3 buah. Fasilitas olahraga sepakbola ada 3 buah, voli ada 2 buah dan tenis meja ada 1 buah. Sarana ekonomi yakni pasar desa 1 buah, perhubungan 8 buah, komunikasi 5112 buah, dan transportasi ada 3558 buah. Dengan demikian jumlah sarana dan prasarana yang ada di Desa Tegalgondo sudah dapat dianggap memenuhi kebutuhan masyarakat. namun perkembangan pembangunan dari tahun ke tahun juga perlu ditingkatkan seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat.

6. Keadaan Pemerintahan Desa Tegalgondo

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Tegalgondo terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Bendahara Desa, 1 Kaur Pemerintahan, 1 Kaur Pembangunan, 1 Kaur Kesra, 1 Kaur Umum, 1 Kasi Agama dan 1 Kepala Linmas. Mengenai data aparat pemerintah desa dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

APARATUR PEMERINTAHAN DESA TEGALGONDO KECAMATAN

KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG TAHUN 2010-2011

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Drs. H. Jamil, SH.M.H	Kepala Desa	Magister (S2)
2	Sucipto Eko Cahyono	Bendahara	SMA
3	Dodik Irawanto	Kaur Pemerintahan	SMA
4	Sanik S.	Kaur Umum	SMA
5	Shodiq Ahmad	Kaur Kesejahteraan sosial	SMA
6	Yadi K.	Kaur Pembangunan	SMA
6	Yasin S.	Kasi Agama	SMA
7	Rofi'i	Kepala Pertahanan Sipil	SMA

Sumber : Data Potensi Desa Tegalgondo

a. Badan Permusyawaratan Desa

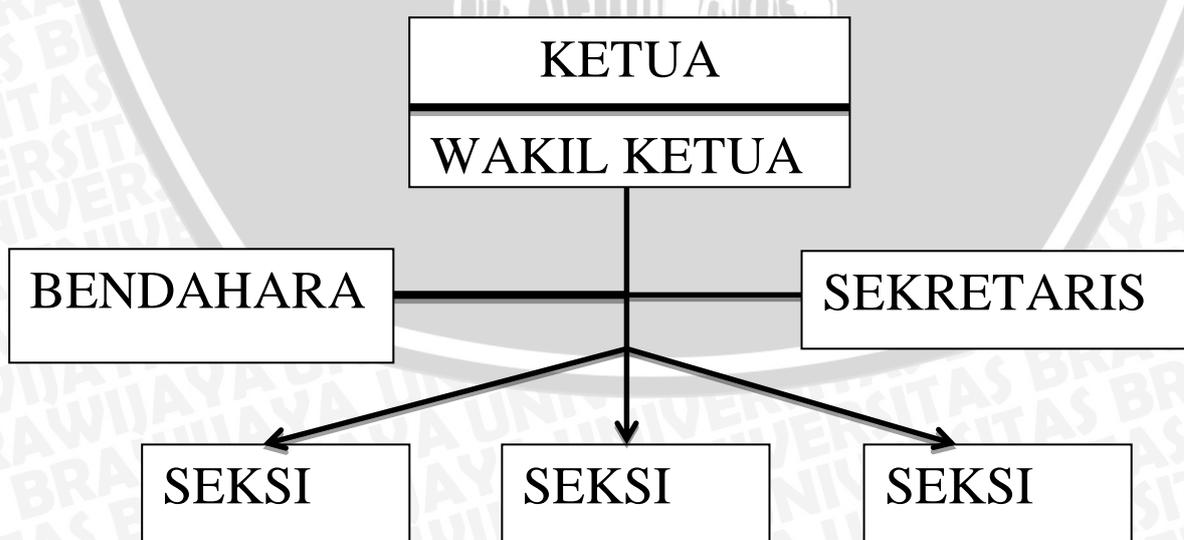
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau yang disebut dengan nama lain LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga permusyawaratan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dalam pembangunan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Hubungan kerja antara LPMD dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Adapun susunan keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini

STRUKTUR LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Hasil penelitian berdasarkan dokumen-dokumen, forum/rapat dan wawancara dengan sumber data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam audit komunikasi ini untuk mendapatkan hasil data penelitian, saya akan menyertakan pertanyaan dengan sumber data untuk memudahkan penjabaran proses komunikasi yang terjadi.

Pihak-pihak yang menjadi sumber data penelitian dalam proses komunikasi kepala desa dalam pembangunan desa adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam komunikasi pembangunan desa, yakni :

- a) Kepala Desa Tegalgondo, Bapak Drs. H. Jamil, SH, MH.
- b) Ketua LPMD Desa Tegalgondo, Bapak Husnan, ST.
- c) Kepala Urusan Pembangunan Desa Tegalgondo, Bapak Yadi S.
- d) Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tegalgondo, Bapak Agus P.
- e) Ketua Rw dan Rt di Desa Tegalgondo yang diambil secara acak.
- f) Tokoh masyarakat Desa Tegalgondo yang diambil secara acak.

1. Audit pada Proses Komunikasi Kepala Desa dalam Pembangunan Desa

Untuk pelaksanaan komunikasi yang terjadi dalam pembangunan, informasi yang disampaikan biasanya berkaitan dengan program pembangunan dan pelaksanaannya. Kepala Desa dalam melakukan komunikasi ini biasanya menginformasikan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan. Kepala Desa dalam melakukan kegiatan komunikasi pembangunan yang dilaksanakan harus melibatkan secara aktif semua pihak yang

berkepentingan serta partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.

a. Komunikasi pada Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Tegalgondo secara menyeluruh dan terpadu pada dasarnya merupakan penjabaran terhadap prioritas pembangunan yang akan dilakukan serta menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan ketugasan Satuan Kerja maka program dan kegiatan yang dirumuskan telah diselaraskan dengan fungsi dan subfungsi yang ada dalam pemerintahan. Dalam aspek pembiayaan pada program pembangunan fisik, Indikasi rencana program dan kegiatan telah mempertimbangkan berbagai sumber seperti APBdes, APBD Kabupaten (ADD), APBD Propinsi dan APBN, sesuai dengan prediksi terhadap batas kapasitas fiskal. Dalam perencanaan pembangunan, komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk membuat perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam bentuk rencana pembangunan desa.

Dalam melaksanakan program pembangunan desa diperlukan suatu mekanisme perencanaan secara matang. Untuk itu pembangunan yang dilaksanakan harus melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan desa peran Kepala Desa sebagai pemimpin musyawarah pembangunan desa bertanggungjawab mengarahkan kebutuhan masyarakat pada kepentingan bersama.

Mekanisme penyusunan daftar usulan rencana proyek (DURP) yang terjadi di Desa Tegalgondo dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan yang meliputi

- a. Persiapan dan penyusunan rencana proyek pembangunan desa/DURP dilakukan oleh kepala desa bersama LPMD untuk dibahas dalam musyawarah/rapat desa yang hasilnya dituangkan dalam keputusan Kepala Desa sebagai dasar penyusunan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP).
- b. Penyusunan DURP dilakukan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Perangkat desa khususnya Kepala Urusan Pembangunan.
- c. Persiapan dan penyusunan rencana proyek bantuan semisal dari PNPM Mandiri dilakukan oleh ketua seksi PNPM dalam LPMD bersama-sama dengan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara keputusan Musyawarah sebagai dasar penyusunan DURP.
- d. Penyusunan daftar rencana pembangunan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat dilaksanakan oleh Kaur Pembangunan dan Seksi Pelaksana Proyek dalam LPMD.
- e. Daftar rencana pembangunan yang telah disusun disampaikan Kepala Desa kepada masyarakat dalam musyawarah pembangunan untuk menampung dan menghimpun aspirasi-aspirasi dari masyarakat tentang jenis proyek apa yang diinginkan dan apa yang dikerjakan.

1. Penyerapan Aspirasi Masyarakat Sebagai Dasar Penyusunan DURP

Pelaksanaan perencanaan pembangunan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya, sehingga komunikasi menjadi faktor utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa harus sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Berikut mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum penyerapan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan DURP sesuai dengan program prioritas pembangunan di Desa Tegalondo yang meliputi:

- a. Program penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang ekonomi desa.

Topik Komunikasi	acara dan tempat	Isi aspirasi
Sarana dan prasarana jalan dan irigasi desa	Murdus (musyawarah tingkat dusun) di balai dusun Gondang (acara dilaksanakan pada bulan januari 2010)	Usulan Bapak Hasan selaku Ketua RW 1 “RW 1 mempunyai usul untuk membuat/memperlebar jalan sawah yang memudahkan petani dalam mengangkut hasil-hasil pertanian, karena selama ini jalan sawah terlalu sempit, bahkan sepeda motorpun kesulitan melewatinya, dan banyak terjadi kerusakan jalan tsb”. Usulan Bapak Kariani selaku Ketua Rw 2, “Aspirasi masyarakat dari Rt 8 yang mempunyai usul perbaikan jembatan penghubung di Rt 8 sebagai jalan pintas yang sering digunakan untuk kepentingan masyarakat, selain itu jalan disamping sungai

		<p>perlu untuk diplester, karena jalan tersebut sering digunakan oleh masyarakat Rt7 dan 8 sebagai alternatif jalan pintas”. Sejalan dengan yang diusulkan Ketua Rt 8 Bapak Dul juga menyatakan “perlu nya perbaikan jembatan Rt 8 dan plester jalan samping sungai untuk mendukung kegiatan warga sehari-hari utamanya yang mempunyai rumah di bantaran sungai”.</p> <p>Usulan Bapak Suli selaku Ketua Rw 3</p> <p>“Usul dari Rw 3 adalah perbaikan jalan utama antara dusun gondang dan babatan yang rusak, sehingga memudahkan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat khususnya dusun babatan.</p>
<p>Sarana dan prasarana jalan dan irigasi desa</p>	<p>Murdus (musyawarah tingkat dusun) di balai dusun Dawuhan</p> <p>(acara dilaksanakan pada bulan januari 2010)</p>	<p>Usulan Bapak Alim selaku Ketua Rw 4</p> <p>“Usulan dari Rw kami adalah Perbaikan jalan lintas SWEREK sengakaling-dawuhan yang merupakan jalan lintas yang sering digunakan masyarakat.</p> <p>Usulan Bapak Doni Selaku Ketua Rw 5 Sejalan dengan Ketua Rt 15 wunutsari Bapak Takim yang menyatakan:</p> <p>“Rw 5 mengusulkan pembuatan gorong-gorong sawah di Rt 15 wunutsari, yang kalo musim hujan sering meluap, meskipun tidak mencapai rumah warga”. Sejalan dengan yang diusulkan Ketua Rt 15 wunutsari Bapak Takim “gorong-gorong yang selama ini sebagai saluran irigasi sering mengalami kebuntuan dan menyebabkan meluapnya air, karena itu hal ini perlu untuk segera diperbaiki”.</p>

<p>Sarana dan prasarana jalan dan irigasi desa</p>	<p>Murdus (musyawarah tingkat dusun) di balai dusun Ketangi (acara dilaksanakan pada bulan januari 2010)</p>	<p>Usulan Bapak Poniman selaku Ketua Rw 8 “ Rw 8 mengusulkan perbaikan gorong-gorong di Rt 23 untuk kemudahan pengairan sawah”.</p> <p>Usulan Bapak Ponito selaku Rw 9 “Rw 9 mengusulkan perbaikan jalan makam yang terletak di samping pemukiman penduduk yang karena semakin banyaknya pemukiman perlunya jalan untuk mendukung kegiatan masyarakat sehari-hari.”</p>
--	---	---

Sumber : Arsip data Murdus Desa Tegalondo 2010-2011

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum dalam rangka menunjang industri kecil perdesaan.

Topik Komunikasi	acara dan tempat	Isi aspirasi
<p>Sarana dan Prasarana Umum dan menunjang kegiatan ekonomi</p>	<p>Murdus (musyawarah tingkat dusun) di balai dusun Dawuhan (acara dilaksanakan pada bulan januari 2010)</p>	<p>Usulan Bapak Cipto Selaku Kepala Dusun Dawuhan, Wunutsari PPERUM IKIP “ Dusun Dawuhan perlu untuk merenovasi balai dusun dawuhan yang sudah banyak mengalami kerusakan”.</p>
<p>Sarana dan Prasarana umum dan menunjang kegiatan ekonomi</p>	<p>Rapat Desa di balai Desa Tegalondo (acara dilaksanakan pada bulan maret 2010)</p>	<p>Usulan Bapak H. Jamil selaku Kepala Desa Tegalondo “Balai Desa Tegalondo perlu untuk direnovasi karena disamping bangunan yang sudah lama, juga perlu penambahan ruang untuk kegiatan rapat dan pelayanan.” Sejalan dengan usulan tsb. Ketua LPMD Bapak Husnan juga menyetujui untuk melakukan</p>

		renovasi Balai Desa Tegalgondo demi menunjang pelayanan publik.
Sarana dan prasarana umum dan menunjang kegiatan ekonomi	Murdus (musyawarah tingkat dusun) di balai dusun Ketangi (acara dilaksanakan pada bulan januari 2010)	Usulan Bapak Bari selaku Kepala Dusun Ketangi “Dusun ketangi perlu untuk pembangunan pos kamling yang selama ini sudah rusak dan tidak difungsikan sehingga kegiatan menjaga keamanan tidak maksimal.”
Sarana dan Prasarana umum dan menunjang kegiatan ekonomi	Rapat Desa di balai Desa Tegalgondo (acara dilaksanakan pada bulan maret 2010)	Usulan dari Bapak Husnan selaku Ketua LPMD Desa Tegalgondo “Pembangunan pasar desa dirasa perlu untuk dilakukan karena semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai usaha dan industri kecil, sehingga dapat mengangkat ekonomi desa.”

Sumber Data : Data Arsip Murdus dan Rapat Desa Tegalgondo 2010-2011

- c. Pengembangan potensi sumberdaya manusia serta kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa.

Topik Komunikasi	Acara dan tempat	Isi aspirasi
Murdus (musyawarah tingkat dusun) di balai dusun Dawuhan (acara dilaksanakan pada bulan januari 2011)	Rapat Desa di balai Desa Tegalgondo (acara dilaksanakan pada bulan Maret 2010)	Usulan dari Ibu Nikmah selaku PKK Desa Tegalgondo “Pendidikan anak-anak khususnya anak balita, perlu untuk diadakan, karena itu pembangunan PAUD (pendidikan anak usia dini) sangat perlu demi memberikan pengetahuan pada anak balita.”

Sarana dan Prasarana pendidikan dan menunjang kegiatan masyarakat	Rapat Dusun di balai dusun Gondang (acara dilaksanakan pada bulan Maret 2010)	Usulan dari Ustad Heri selaku Tokoh Masyarakat “perlu renovasi Bangunan Taman Pendidikan Al Qur’an untuk kegiatan pendidikan agama dan pengajian rutin karena bangunan lama sudah banyak mengalami kerusakan dan atapnya lapuk.”
Murdus (musyawarah tingkat dusun) di balai dusun Dawuhan (acara dilaksanakan pada bulan Januari 2011)	Murdus (musyawarah tingkat dusun) di balai dusun Dawuhan (acara dilaksanakan pada bulan Januari 2010)	Usulan Bapak Gus Ali selaku Tokoh Masyarakat: “Aspirasi dari masyarakat khususnya dusun dawuhan adalah renovasi masjid dusun dawuhan, untuk memperlancar kegiatan pengajian dan ibadah”.

Sumber Data : Data Arsip Murdus dan Rapat Desa Tegalondo 2010-2011

Dari data diatas dapat diketahui DURP yang disusun oleh Perangkat Desa dan LPMD berasal dari aspirasi masyarakat dan pemerintah desa dalam kegiatan pertemuan/rapat musyawarah yang dilakukan baik dalam tingkat dusun maupun pada tingkat desa.

2. Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan masyarakat sangat berbeda dan menuntut untuk dilaksanakan. Hal ini merupakan tantangan bagi perencana pembangunan desa untuk sedapat mungkin memilih prioritas kebutuhan yang paling mendesak pelaksanaannya. Kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi kebutuhan masyarakat.

Identifikasi kebutuhan yaitu pengumpulan data mengenai kebutuhan masyarakat untuk tahun anggaran yang akan direncanakan dan dilaksanakan, dan merupakan kegiatan pendahuluan sebelum dilaksanakan suatu perencanaan.

Hasil wawancara dengan sumber data Kepala Desa Tegalgondo, Bapak Drs. H. Jamil, adalah sebagai berikut :

Pertanyaan : Apa langkah awal yang mesti dilakukan untuk menyusun rencana pembangunan ?

“Langkah awal dalam perencanaan adalah identifikasi kebutuhan, kegiatan identifikasi kebutuhan sangat diperlukan dalam proses penyusunan pembangunan desa. Karena dari identifikasi tersebut dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan masyarakat, yang disertai dengan pengumpulan data potensi lapangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan adalah : keadaan masa lalu, keadaan masa sekarang, dan kecenderungan-kecenderungan di masa yang akan datang”. (Kantor Desa Tegalgondo.” (wawancara di kantor desa pada 5 mei 2011)

Sejalan dengan hal tersebut, pentingnya identifikasi kebutuhan merupakan tahap awal dan yang paling utama dalam perencanaan pembangunan, hal ini seperti yang diutarakan oleh Ketua LPMD Bapak Husnan S.T sebagai berikut :

“Langkah-langkah dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui penjenisan rencana proyek pembangunan sesuai tingkatannya. Kebutuhan masyarakat yang paling mendesak ditempatkan di urutan pertama yang memerlukan pelaksanaan secepatnya. (wawancara di kantor desa pada 23 mei 2011).

Dari wawancara diatas terlihat kesesuaian antara kepala desa dengan ketua LPMD dalam memperhatikan identifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat disertai pengumpulan data di lapangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan adalah : keadaan masa lalu, keadaan masa sekarang, dan kecenderungan-kecenderungan di masa yang akan datang. Data-data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan atau didasarkan pada data yang tertuang dalam papan/daftar potensi desa yang dijamin kebenarannya. Kemudian data-data disistematiskan, disusun sebagai suatu rencana, untuk ditentukan kebutuhan yang merupakan super prioritas (kebutuhan mendesak) dan skala prioritas (kebutuhan kurang mendesak).

Kegiatan identifikasi kebutuhan dilakukan oleh kepala desa bersama-sama dengan LPMD dibantu oleh Perangkat Desa. Ini dimaksudkan agar kepentingan masyarakat lebih diutamakan, apalagi yang merupakan super prioritas. Hasil identifikasi kebutuhan masyarakat selama tahun anggaran 2010-2011 adalah :

No	Lokasi	Rencana Kegiatan Proyek	volume
1	Rw 1 dan 2	Pembangunan jalan sawah	180m x 3m x 0,07m
2	Rw 1	Renovasi balai desa	60m x 25 m x 15m
3	Rw 2	Renovasi TPQ	20m x 6m x 5m
4	Rw 2	Pembangunan PAUD	120m x 10m x 4m
5	Rw 2	Plester jalan sungai	20m x 1m x 0,07m
6	Rw 3	Perbaikan jalan desa	50m x 4m x 0,07m

7	Rw 4	Perbaikan jalan pintas	10m x 1m x 0,07m
8	Rw 4	Renovasi masjid	40m x 10m x 4m
9	Rw 4	Perbaikan balai dusun	6m x 6m x 5m
10	Rw 5	Gorong-gorong	0,25m x 50m
11	Rw 6	Pembangunan pasar desa	90m x 5m x 3m
12	Rw 8	Perbaikan saluran air	0,25m x 10m
13	Rw 8	Perbaikan jalan makam	2m x 10m
14	Rw 9	Pos kamling	2m x 1m x 1,5m

Sumber : Data DURP Desa Tegalgondo 2010-2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk anggaran 2010-2011 identifikasi kebutuhan dalam daftar usulan rencana kegiatan proyek di Desa Tegalgondo berjumlah 14 buah. Usulan kebutuhan sebagian besar berupa perbaikan bangunan sebanyak 8 buah dan pembangunan sarana prasarana 4 buah serta usulan kebutuhan lainnya 2 buah.

3. Peran Artikulasi Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan

Berbagai macam kepentingan utamanya dalam penyusunan rencana pembangunan merupakan hal yang pokok dalam setiap program pembangunan. Kepentingan-kepentingan tersebut pada hakekatnya merupakan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.

Proses komunikasi pada perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengadakan pertemuan/rapat. Penyusunan rencana pembangunan yang terjadi di Desa Tegalgondo dilakukan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Musyawarah ini melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, LPMD, serta perwakilan masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tegalgondo Drs. H. Jamil sebagai berikut.

Pertanyaan : Siapa saja yang pihak-pihak berperan dalam kegiatan perencanaan dalam pembangunan desa ?

“Dalam perencanaan pembangunan saya menghubungi aparatur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa serta tokoh masyarakat untuk mengadakan pertemuan. Pihak-pihak yang diundang diantaranya adalah : Aparatur pemerintahan desa (Kaur Pembangunan, bendahara, sekertaris desa), dan LPMD (lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa), Ketua RW (Rukun Warga) dan Ketua RT (Rukun Tetangga), serta Tokoh Masyarakat.” (wawancara di kantor desa pada 5 mei 2011).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Yadi S. Selaku Kaur Pembangunan sebagai berikut :

“Dalam setiap perencanaan pembangunan, pemerintah desa selalu mengadakan suatu pertemuan untuk membahas program pembangunan yang akan dilaksanakan, pihak-pihak yang hadir adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD sebagai komunikan dan perwakilan masyarakat yakni dari RW dan RT serta Tokoh Masyarakat sebagai komunikator.” (wawancara di kantor desa pada 13 mei 2011)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam pkomunikasi pada perencanaan pembangunan yang terjadi di Desa tegalgondo melibatkan tiga subjek pokok yang saling bekerjasama untuk menyusun rencana pembangunan desa. Tiga subjek tersebut terdiri dari :

a) Kepala Desa Tegalgondo

Peran Kepala Desa disini bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan pembangunan yang terjadi di desa selain itu juga sebagai penyusun rencana pembangunan desa, beliau juga mengemukakan mengenai proyek pembangunan yang diperlukan oleh desa sesuai dengan kebutuhan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tegalgondo Bapak H. Jamil sebagai berikut :

Pertanyaan : Apa peran bapak dalam komunikasi pada perencanaan pembangunan yang terjadi di Desa Tegalgondo ?

“Dalam perencanaan pembangunan saya berperan sebagai penyusun dan penentu rencana proyek yang akan dilaksanakan. Komunikasi yang saya lakukan dalam perencanaan yakni dengan membicarakan dengan masyarakat semisal dalam pertemuan tidak formal, seperti pengajian, acara kesenian, dll. Dari komunikasi non formal tersebut saya mengetahui garis besar kebutuhan masyarakat, untuk selanjutnya dalam rapat desa dengan perangkat desa dan LPMD, disusun DURP yang benar-benar relevan dan menampung aspirasi masyarakat.“ (wawancara di kantor desa pada 3 juni 2011)

b) Aparatur Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

Perangkat Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa)

Perangkat desa yang dimaksud disini adalah Kepala urusan pembangunan Bapak Yadi S. beliau berperan menyusun DURP yang didasarkan pada aspirasi kebutuhan masyarakat. dalam menyusun DURP beliau mengambil dari hasil musyawarah tingkat dusun (murdus) yang biasanya dilakukan pada bulan januari di setiap dusun untuk membahas kebutuhan diperlukan oleh masyarakat. Hasil Murdus tersebut merupakan identifikasi kebutuhan masyarakat yang perlu untuk dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan, Bapak Yadi S. sebagai berikut :

Pertanyaan : Apa tugas dan peran yang bapak lakukan dalam komunikasi pada perencanaan pembangunan ?

“saya berperan sebagai penyusun DURP yang didasarkan pada aspirasi-aspirasi dari masyarakat. identifikasi kebutuhan untuk penyusunan DURP saya ambil dari hasil musyawarah tingkat dusun yang merupakan aspirasi masyarakat tingkat bawah.”

LPMD juga berperan menyusun DURP yang didasarkan pada aspirasi kebutuhan masyarakat, untuk proses penyusunan DURP, LPMD membantu Kepala Desa dalam menyusun DURP.

Hasil wawancara dengan Ketua LPMD, Bapak Husnan sebagai berikut

Pertanyaan : apa peran yang dijalankan LPMD dalam perencanaan pembangunan ?

“LPMD berperan menyusun DURP. Aspirasi-aspirasi yang masuk melalui anggota LPMD ditampung semua untuk kemudian dalam menyusun DURP, LPMD bersama kepala desa membahas identifikasi kebutuhan yang terkumpul melalui musyawarah/rapat desa yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP).” (wawancara di kantor desa pada 3 juni 2011)

c) Masyarakat yang terdiri dari ketua RT dan RW serta Tokoh masyarakat.

Partisipasi masyarakat melalui perwakilannya dalam hal perencanaan pembangunan diwujudkan dalam sebuah forum seperti rapat yang membahas tentang rencana yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tegalondo sebagai contoh forum/rapat tersebut adalah musyawarah tingkat dusun (Murdus), musayawarah tingkat desa (Murdes). Para wakil masyarakat ini akan menampung aspirasi

masyarakat kemudian akan disampaikan di depan forum rapat perencanaan pembangunan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Rw 1, Bapak Hasan sebagai berikut :

Pertanyaan : bagaimana peran masyarakat selama ini dalam proses komunikasi pada perencanaan pembangunan ?

“Partisipasi masyarakat Desa Tegalgondo dalam hal perencanaan pembangunan di desanya tidak dilakukan oleh keseluruhan masyarakat melainkan melalui wakil-wakil mereka yakni Ketua RW dan RT serta Tokoh Masyarakat. Sehingga usulan-usulan rencana pembangunan di suatu wilayah harus melalui wakil-wakil masyarakat tersebut. Biasanya kami menyalurkan aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan di wilayah melalui musyawarah tingkat dusun (Murdus).” (wawancara dirumahnya pada 7 juni 2011)

Ustad Heri Abdul Haq juga menyatakan bahwa :

“Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui penyaluran aspirasinya dalam musyawarah tingkat dusun yang biasanya dilakukan pada bulan januari setiap tahun. Hasil musyawarah yang dilakukan benar-benar menunjukkan aspirasi masyarakat berasal dari bawah yaitu masyarakat, kemudian melalui Ketua RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat.” (wawancara di rumahnya, pada 8 juni 2011)

3. Cara Komunikasi

Proses komunikasi menunjukkan bagaimana suatu pesan atau informasi nisa sampai ke penerima. Proses komunikasi berawal dari orang yang mengirimkan pesan, pesan dikirimkan melalui saluran/jalan yang dilalui pesan dari si pengirim kepada penerima. Karena komunikasi merupakan proses dua arah atau timbal balik maka komponen balikan perlu ada dalam proses komunikasi. Kegiatan komunikasi dalam usaha untuk perencanaan pembangunan sangat penting untuk dilakukan.

Cara komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan perencanaan pembangunan haruslah mampu mewedahi setiap aspirasi yang muncul dalam perencanaan pembangunan desa. berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui, pada pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa Tegalgondo, proses komunikasi dilaksanakan secara langsung. Komunikasi secara langsung pada perencanaan pembangunan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan/rapat.

4. Kegiatan Komunikasi dalam Perencanaan

Dalam menentukan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, diadakan suatu rapat/pertemuan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikannya. Disini dibahas tentang daftar usulan rancangan pembangunan, masyarakat dalam hal ini adalah Ketua Rt/Rw dan Tokoh Masyarakat turut berperan menentukan DURP yang mesti segera dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan komunikasi ini, media yang digunakan yaitu apabila yang hadir tidak lebih dari 30 orang dilakukan tanpa bantuan penguat suara, tetapi cukup dengan papan tulis. Namun apabila yang hadir lebih dari 30 orang, media yang digunakan yaitu penguat suara dan papan tulis. Tempat pertemuan yang digunakan biasanya di kantor desa atau balai desa tiap dusun. Pada umumnya rapat umum di desa ini diadakan pada bulan maret sebagai bulan bakti LPMD dalam melaksanakan program selama satu tahun anggaran.

Apabila waktu yang digunakan untuk melakukan komunikasi tidak tepat, maka tujuan komunikasi yang diharapkan tidak akan tercapai secara efektif. Oleh karena itu strategi waktu perlu diperhatikan apalagi menyangkut kesediaan komunikasi untuk berinteraksi dalam setiap proses komunikasi. Dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi yang terjadi di Desa Tegalgondo waktu yang dipergunakan untuk mengadakan pertemuan tersebut yakni pagi antara pukul 09.00 s.d 13.00 wib, untuk siang antara pukul 14.00 s.d 17.00 wib, dan malam antara pukul 19.00 s.d 24.00 wib. Mengenai bahasa yang digunakan adalah bahasa campuran antara jawa dan indonesia. Media yang digunakan yakni pengeras suara dan papan tulis. Dalam proses penyampaian informasi, Komunikator jarang menggunakan statistik, peta, monografi maupun grafik karena mengingat pendidikan masyarakat Desa Tegalgondo menengah kebawah sehingga dikhawatirkan tidak mampu menafsirkan pesan yang ada pada media tersebut.

Jalan lain yang ditempuh oleh Kepala Desa dalam komunikasi perencanaan pembangunan adalah dengan cara komunikasi tidak langsung yakni dengan mengirim surat perintah kepada ketua LPMD, untuk segera melaksanakan pembangunan yang telah ditentukan tanpa adanya musyawarah.

Dalam perintah tersebut kepala desa harus menguraikan sepenuhnya mengenai rancangan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan tersebut kepada ketua LPMD atau Kaur Pembangunan, hal ini sebagaimana penjelasan dari Bapak Kepala Desa Tegalgondo Drs. H. Jamil yang mengatakan bahwa :

“Meskipun hal ini jarang dilakukan, apabila dirasa oleh kepala desa suatu proyek pembangunan sangat diperlukan sehubungan dengan kebutuhan

masyarakat maka Kepala Desa bisa menggunakan surat perintah kepada ketua LPMD untuk merencanakan pembangunan tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu. Disamping itu kepala desa juga menerima aspirasi masyarakat di dalam pembangunan, apapun yang direncanakan oleh masyarakat apabila dipandang oleh kepala desa baik, maka kepala desa memberi peluang untuk dilaksanakan, namun bukan berarti kepala desa melepaskan diri dari segalanya, kepala desa selaku pemimpin tunggal yang ada di desa tetap bertanggung jawab kepada pembangunan yang ada.” (wawancara di kantor desa pada 6 mei 2011)

Penyataan yang lain diungkapkan oleh Ketua LPMD Bapak Husnan S.T mengenai hal tersebut yakni :

“Perencanaan pembangunan harus berdasarkan pada mekanisme perencanaan yang sudah ditetapkan. Prosedur perencanaan pembangunan ini adalah baku dan alasan-alasan apapun yang menyimpang dari aturan baku tidak dibenarkan karena berpotensi terjadi penyelewengan dan adanya kepentingan pribadi.”(wawancara di rumahnya pada 9 mei 2011)

Dari wawancara pernyataan diatas dapat diketahui, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan, yang pertama, mengenai komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam rangka perencanaan pembangunan bisa dilaksanakan dengan menggunakan surat perintah kepada ketua LPMD untuk merencanakan pembangunan yang telah diperintahkan oleh kepala desa tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu. Sedangkan pendapat yang kedua menunjukkan bahwa setiap perencanaan pembangunan desa harus melalui mekanisme yang sudah ada, dan hal ini menjadi mutlak untuk dilaksanakan.

Setelah penelitian lebih lanjut ternyata pendapat Kepala Desa merupakan sesuatu yang legal dan hal ini sudah sering dilakukan oleh kepala desa yang terdahulu. Bersumber pada masa lalu, pelaksanaan komunikasi seperti ini didasari pada rendahnya kualitas aparatur pemerintahan desa, sehingga pelaksanaan komunikasi tersebut merupakan hal yang diperbolehkan. Namun di lain pihak

seiring perkembangan waktu dan pendidikan serta pelatihan yang diterima aparaturnya, pendapat ketua LPMD untuk saat ini merupakan hal yang rasional, karena praktek-praktek pelaksanaan komunikasi seperti itu rawan terhadap penyelewengan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam perencanaan ini menggunakan dua cara yakni komunikasi langsung dengan melibatkan masyarakat serta aparaturnya pemerintahan desa dan komunikasi tidak langsung yang melalui surat perintah. Mekanisme pelaksanaan dan peran artikulasi kepentingan yang terjadi menunjukkan komunikasi dalam perencanaan pembangunan adalah hal yang penting dalam berhasilnya suatu pembangunan, proses kerjasama serta saling melengkapi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang harus dipenuhi demi tercapainya keberhasilan pembangunan.

b. Komunikasi pada Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Komunikasi merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada orang lain sebagai komunikan. Komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa dilakukan secara langsung yakni dengan komunikasi tatap muka langsung dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalgondo di lokasi proyek pembangunan desa. adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan adalah :

1) Kepala Desa Tegalgondo, Bapak Drs. H. Jamil

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam pelaksanaan komunikasi pada proses pengerjaan proyek pembangunan. Kepala Desa selalu meninjau lokasi pembangunan untuk kemudian di lokasi pembangunan tersebut kepala desa didampingi perangkat desa/LPMD melakukan dialog dengan ketua TPK /mandor pembangunan untuk mengetahui perkembangan pengerjaan proyek pembangunan yang terjadi.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tegalgondo adalah sebagai berikut :

Pertanyaan : Bagaimana kegiatan komunikasi pembangunan yang terjadi dalam proses pengerjaan proyek pembangunan yang terjadi di Desa Tegalgondo ?

“Kegiatan yang saya lakukan dalam pelaksanaan proyek pembangunan lebih banyak saya lakukan dengan mengadakan peninjauan ke lokasi pembangunan. Untuk komunikasinya sendiri hal-hal yang menjadi topik pembicaraan adalah biasanya adalah seputar perkembangan proyek pembangunan yang terjadi. Selebihnya kalau ada masalah dalam pengerjaan proyek semisal keterlambatan pembangunan, maka hal tersebut akan dibahas kemudian dalam rapat desa baik secara formal maupun informal. Hal itu dilakukan kalau memang terdapat masalah yang memerlukan segera pemecahan, selebihnya jika pengerjaan proyek pembangunan berjalan lancar, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan.” (wawancara di kantor desa, pada 29 juni 2011)

2) Perangkat Desa (Kaur Pembangunan) Bapak Yadi S. atau ketua/anggota LPMD.

Hasil penelitian yang dilakukan pada proses pelaksanaan pembangunan, peran Kaur pembangunan maupun LPMD adalah mendampingi Kepala Desa dalam peninjauan langsung pada proses pembangunan, biasanya komunikasi yang terjadi banyak melibatkan kaur

pembangunan dengan TPK yang membicarakan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek pembangunan. Disini perangkat desa juga mengawasi perkembangan hasil pembangunan untuk kemudian dijadikan dasar laporan pertanggungjawaban pembangunan. Hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Pertanyaan : Sebagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan, bagaimana komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan ?

“Pada proses pengerjaan proyek pembangunan saya mendampingi bapak kades dalam meninjau proyek pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah desa dapat mengawasi jalannya proses pembangunan yang terjadi di desa dalam peninjauan tersebut saya bersama Kepala Desa berdialog dengan TPK seputar perkembangan pembangunan, untuk kelancaran pembangunan. Namun apabila teradapat kendala yang muncul selama proses pelaksanaan pembangunan, maka akan ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat untuk membahas penyelesaian hal tersebut.” (wawancara di kantor desa pada 29 juni 2011).

Selanjutnya tanggapan dari Bapak Husnan selaku Ketua LPMD adalah sebagai berikut :

“Komunikasi yang saya lakukan pada saat pelaksanaan pembangunan adalah sebagai pelaksana proses pembangunan, selain itu saya sebagai ketua LPMD berkewajiban mengawasi jalannya proses pembangunan, dalam hal ini TPK sebagai pelaksana pembangunan merupakan bentukan LPMD, pelaksanaan komunikasi yang terjadi lebih sering dilakukan dengan seksi pembangunan LPMD yaitu bapak agus yang juga sebagai ketua TPK, topik komunikasi yang dibicarakan biasanya adalah kesesuaian pembangunan yang terjadi dengan rancangan yang telah dibentuk, karena itu segala keperluan yang dibutuhkan serta hambatan yang terjadi dalam pengerjaan proyek selalu dikonsultasikan dulu dengan saya. (wawancara di rumahnya pada 29 juni 2011)

- 3) TPK (tim pelaksana kegiatan) LPMD Desa Tegalondo dengan ketuanya Bapak Agus Pranoto.

Hasil penelitian yang dilakukan dalam proses komunikasi pada pelaksanaan pembangunan, dapat diketahui bahwa peran TPK adalah sebagai pelaksana proses pembangunan, TPK melaksanakan pembangunan sesuai dengan rancangan pembangunan yang telah dibuat. Hasil wawancara dengan ketua TPK, Bapak Agus Paranoto adalah sebagai berikut :

Pertanyaan : Bagaimana komunikasi yang anda lakukan selama proses pelaksanaan pembangunan ?

“Karena TPK adalah sebagai pelaksana kegiatan pembangunan, komunikasi yang terjadi biasanya adalah seputar kesesuaian pengerjaan proyek pembangunan yang dilaksanakan dengan rancangan pembangunan yang telah dibuat sebelumnya oleh LPMD, TPK sebagai bagian dari LPMD hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan. Tetapi bila dalam pelaksanaan pembangunan terdapat hambatan-hambatan pengerjaan proyek maka saya selalu melapor pada ketua LPMD/Kaur Pembangunan untuk penyelesaian masalah tersebut.” (wawancara di rumahnya pada 29 juni 2011)

1. Cara komunikasi

Pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Tegalondo, proses komunikasi yang dilaksanakan dengan cara komunikasi langsung dengan menggunakan bentuk yang berbeda-beda. Secara langsung karena seringkali kepala desa datang langsung pada lokasi dimana pembangunan tersebut dilaksanakan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan perangkat desa serta LPMD dan selanjutnya sekali waktu diadakan suatu pertemuan yang secara khusus membahas masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan

pembangunan. Dari data yang saya peroleh, untuk setiap proyek pembangunan dibentuk suatu tim sebagai pelaksana kegiatan proyek. Pihak yang berperan sebagai pelaksana pembangunan adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tim ini dibentuk oleh LPMD yang bertujuan untuk menjadi pelaksana kegiatan.

Cara berkomunikasi lain yang ditempuh oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan ini adalah dengan cara sekali waktu diadakan suatu pertemuan yang secara khusus membahas masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan untuk membahas cara pemecahannya yang dihadiri kepala desa, Perangkat Desa, LPMD (lembaga Permusyawaratan Desa), dan Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Kegiatan Komunikasi dalam Pelaksanaan

Komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan adalah dengan terjun langsung ke lokasi pembangunan. Di lokasi pembangunan tersebut Kepala Desa beserta staf langsung mengadakan dialog dengan para pelaksana pembangunan, yakni tim pelaksana kegiatan (TPK) serta masyarakat yang secara swadaya membantu pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, komunikasi langsung yang dilakukan selain meninjau ke lokasi pembangunan, sekali waktu juga diadakan pertemuan.

Sebagai contoh komunikasi langsung pada pelaksanaan pembangunan adalah kedatangan kepala desa ke lokasi pembangunan pada waktu pembangunan tersebut sedang dikerjakan, sehingga kepala desa dapat langsung mengadakan dialog dengan pelaksana kegiatan dan masyarakat yang ada pada lokasi

pembangunan tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh mengenai pelaksanaan komunikasi kepala desa di dalam pelaksanaan pembangunan pada tabel 11 berikut :

KOMUNIKASI PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Bahan Komunikasi	Komunikator	Tempat	Komunikan	Frekwensi
Pembangunan PAUD	Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua LPMD,	Lokasi Pembangunan	TPK (tim pelaksana kegiatan)	2 Kali selama 1 bulan

Sumber : Data Arsip Pembangunan Desa Tegalgondo

Dengan melihat contoh pelaksanaan komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan diatas, dapat dilihat bahwa kepala desa meninjau lokasi pembangunan secara langsung dan mengadakan dialog dengan TPK maupun masyarakat yang membantu secara swadaya dalam pengerjaan proyek pembangunan dan membahas mengenai kendala dilapangan serta perkembangan pembangunan yang terjadi.

Selain dengan meninjau langsung keadaan proyek pembangunan di lapangan, kepala desa bisa menindaklanjuti kendala-kendala yang ditemui selama proses pelaksanaan pembangunan dengan mengadakan suatu pertemuan untuk membahas kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan. Dalam pertemuan tersebut, materi/pesan yang disampaikan biasanya membahas kendala-kendala selama proses pelaksanaan pembangunan.

Peran pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan sangat mendukung pada keberhasilan pembangunan itu sendiri. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. H. Jamil selaku Kepala Desa Tegalgondo adalah sebagai berikut :

Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan komunikasi yang terjadi selama pelaksanaan proyek pembangunan ?

“Komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, selain dengan terjun langsung ke lokasi pembangunan sekali waktu diadakan pertemuan untuk membahas kendala-kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan pembangunan. Dalam Pertemuan tersebut masalah-masalah yang terjadi selama pelaksanaan proyek pembangunan dikemukakan dan secara bersama-sama dicari solusinya.” (wawancara di rumahnya, pada 7 mei 2011)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Bapak Agus Pranoto mengatakan :

“Bahan komunikasi pada waktu melakukan peninjauan langsung secara bertahap terhadap suatu proyek pembangunan, adalah masalah-masalah yang muncul selama proses pembangunan. Hal ini tentunya sangat menunjang terhadap kesesuaian antara rancangan dengan hasil yang diharapkan dan jika terdapat kendala pelik yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan maka diadakan pertemuan untuk menindaklanjuti hal tersebut” (wawancara di rumahnya pada 9 mei 2011).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pesan komunikasi secara langsung ini berkaitan dengan kendala-kendala yang ditemui selama proses pelaksanaan proyek pembangunan. Peran kepala desa untuk terjun langsung dalam pelaksanaan pembangunan merupakan hal selalu dilakukan, komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan Pelaksana Pembangunan (TPK) dalam rangka pelaksanaan pembangunan dilakukan agar terjadi komunikasi dua arah yang berjalan timbal balik, sehingga materi/pesan dapat tersampaikan dan terjadi

kesesuaian antara rancangan pembangunan dengan hasil yang diharapkan. Tujuan diadakannya pertemuan tersebut adalah bila terdapat masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan dibahas secara langsung dengan cara musyawarah dan bisa memperoleh jalan keluar. Dengan adanya hal ini diharapkan nantinya supaya jalannya pelaksanaan pembangunan yang ada bisa berjalan seperti yang diharapkan

c. Komunikasi pada Pengawasan Pembangunan Desa

Dalam proses kegiatan pembangunan pada akhirnya diharapkan adanya pengawasan terhadap hasil pembangunan. Demikian juga dengan proses komunikasi dalam pembangunan yang terjadi di Desa Tegalondo, fungsi pengawasan merupakan salah satu pokok penentu keberhasilan dalam pembangunan.

Pembangunan desa tidak bisa berjalan dengan sempurna apabila tidak terdapat pengawasan dalam pembangunan, artinya diadakan pemeriksaan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah segala sesuatunya sudah dijalankan menurut rencana dan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan.

Dalam proses kegiatan komunikasi, cara komunikasi pada pengawasan pembangunan di Desa Tegalondo dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

Komunikasi langsung dalam proses komunikasi dalam pengawasan sangat sering digunakan. Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Jamil selaku Kepala Desa Tegalgondo, adalah sebagai berikut :

Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan komunikasi yang bapak lakukan pada pengawasan pembangunan ?

“Komunikasi yang sering dilakukan pada pengawasan pembangunan adalah dengan mengadakan rapat/pertemuan yang sifatnya informal. Karena pertemuan informal tidak membutuhkan waktu dan tempat yang khusus sehingga bisa dilaksanakan sewaktu-waktu selama pelaksanaan pembangunan.” (wawancara di kantor desa pada 13 mei 2011)

Sejalan dengan pernyataan tersebut Bapak Husnan selaku Ketua LPMD menyatakan bahwa :

“Komunikasi langsung yang sifatnya informal sering dilakukan dalam pengawasan pembangunan desa. pertemuan yang dilakukan biasanya dilakukan setiap 2 minggu sekali untuk membahas perkembangan pembangunan dan kendala yang dihadapi selam proses pelaksanaan. Selain itu sering dalam banyak kesempatan pertemuan informal ini digunakan untuk membahas laporan hasil pembangunan.” (wawancara di Kantor Desa pada 13 mei 2011)

Komunikasi pada pengawasan pembangunan yang sifatnya tidak langsung yang terjadi di Desa Tegalgondo adalah dengan cara penyampaian pesan/informasi dimana komunikator tidak berhadapan langsung dengan komunikan. Sebagai contoh komunikasi tidak langsung pada pengawasan pembangunan dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

BENTUK KOMUNIKASI TIDAK LANGSUNG PADA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

No	Bentuk Komunikasi	Frekwensi per bulan selama proses pembangunan
1	Surat	2 kali/bulan
2	Laporan hasil Pembangunan	1 kali/bulan

Sumber : Data Arsip Pembangunan Desa Tegalgondo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk kegiatan komunikasi pada pengawasan pembangunan yang sifatnya tidak langsung terbagi dalam dua bentuk komunikasi. Dari ketiga bentuk komunikasi tersebut yang sering dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengawasan pembangunan adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Hal ini ini dilakukan apabila adanya keterbatasan waktu yang dimiliki Kepala Desa untuk mengadakan pertemuan. Proses komunikasi seperti ini dilakukan dengan dilakukan dengan cara melihat laporan yang disampaikan oleh Kaur Pembangunan dan Ketua LPMD sebagai laporan pertanggung jawaban tentang pengawasan pembangunan.

1. Kegiatan Komunikasi dalam Pengawasan

Proses pelaksanaan komunikasi langsung pada pengawasan pembangunan yang terjadi di Desa Tegalgondo dilakukan oleh kepala desa dengan cara memberikan suatu pendelegasian tanggungjawab yang kemudian diserahkan kepada orang yang bertanggungjawab atas pembangunan yang ada, seperti Tim Pelaksana Kegiatan, perangkat desa, dan Ketua LPMD. Selanjutnya hasil

pengawasan tersebut dimasukkan dalam berita acara pelaporan hasil pembangunan untuk kemudian dibahas dalam pertemuan dengan kepala desa. Hasil wawancara dengan sumber data, Bapak Husnan selaku Ketua LPMD Desa Tegalondo adalah sebagai berikut :

Pertanyaan : Bagaimana bentuk komunikasi pada pengawasan pembangunan desa yang terjadi di Desa Tegalondo ?

“Pada pengawasan pembangunan saya diwajibkan untuk membuat laporan pembangunan. Laporan pembangunan ini saya buat tidak hanya selama pada saat pembangunan itu selesai tetapi juga pada waktu pelaksanaan pembangunan itu berjalan. Laporan itu berisi perkembangan pembangunan dan kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaan pembangunan itu. (wawancara di kantor desa pada 11 mei 2011)

Sejalan dengan pernyataan diatas hasil wawancara dengan Bapak Yadi S. selaku Kaur Pembangunan, sebagai berikut :

“Saya sebagai kaur selalu mempunyai tugas untuk membuat laporan perkembangan pembangunan. Laporan tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat/pertemuan untuk pengawasan dalam pembangunan. Selanjutnya setelah pembangunan itu sendiri selesai, saya juga membuat laporan hasil pembangunan sebagai laporan pertanggung jawaban pembangunan” (wawancara di kantor desa pada 13 mei 2011)

Berdasarkan wawancara diatas dengan melihat komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan aparatur dalam rangka pengawasan pembangunan desa tampaklah kesesuaian pernyataan bahwa komunikasi dilakukan secara langsung, yakni dengan mengadakan rapat mengenai perkembangan pembangunan serta kendala-kendala dalam pembangunan. Dengan komunikasi langsung tersebut tentunya kepala desa akan lebih mudah untuk menyampaikan pesan karena dapat berdialog langsung dengan penanggung jawab pembangunan. Dengan

mengadakan pengawasan yang dilakukan setiap 2 minggu sekali, maka tentunya hal ini memperkecil kemungkinan adanya suatu hal yang tidak diinginkan.

d. Hasil-hasil Pembangunan

Hasil-hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalgondo dalam periode pembangunan 2010-2011 pada tabel 13 berikut :

DATA PEMBANGUNAN DESA TEGALGONDO PERIODE 2010/2011

No	Kegiatan Proyek	Tempat	Volume
1	Pembangunan Pasar Desa	Dk. Wunutsari	90 m x 5m x 3m
2	Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dusun Gondang	120m x 10m x 4m
3	Renovasi Balai Desa	Dusun Gondang	60m x 25m x 15m
4	Pembangunan Jalan Sawah	Dusun Gondang	180m x 3m x 0,07m
5	Pembangunan Pos Kamling	Dusun Ketangi	3m x 2,5m x 1,5m
6	Perbaikan Jalan Desa	Dk. Babatan	4m x 500m x 0,07m
7	Perbaikan Jalan Lintas	Dusun Dawuhan	180m x 1m x 0,05m

Sumber Data : Data Arsip Pembangunan Desa Tegalgondo

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk tahun anggaran 2010/2011, proyek pembangunan yang dilaksanakan di Desa tegalgondo berjumlah 7 buah. Pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan anggaran yang ditentukan untuk tahun 2010/2011 berjumlah 466.369.072 juta. Penggunaan anggaran pembangunan tersebut dilakukan beraneka ragam sesuai kebutuhan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Komunikasi Pembangunan Desa.

Dalam pelaksanaan komunikasi selalu terdapat faktor yang menjadi penentu dalam proses komunikasi. Faktor penentu tersebut bisa berupa faktor pendukung dan juga faktor yang menghambat pelaksanaan komunikasi itu.

a. Faktor Pendukung Komunikasi

Dalam pelaksanaan komunikasi tentulah ditunjang oleh faktor pendukungnya. Begitu juga dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan di Desa Tegalgondo ini, yang ditunjang oleh faktor-faktor yang mendukung berjalannya keefektifan komunikasi itu, antara lain :

1) Media yang memadai untuk menyampaikan pesan

Dalam proses komunikasi, diperlukan media untuk penyampaiannya. Penggunaan media yang memadai akan membuat proses komunikasi yang terjadi semakin lancar. Media yang memadai disini haruslah media yang sesuai dengan jenis informasi yang akan disampaikan. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh bapak Drs. H. Jamil selaku Kepala Desa Tegalondo bahwa

“Salah satu faktor pendukung dalam proses komunikasi pembangunan adalah media yang memadai untuk menyampaikan pesan. Karena dengan media yang tepat, amak proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif.” (wawancara di rumahnya, pada 7 mei 2011)

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa media yang memadai sangat mendukung penyampaian pesan pembangunan kepada masyarakat.

2) Komunikator mengetahui kemampuan komunikan

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan komunikasi adalah bahwa komunikator mangetahui kemampuan komunikan. Karena dengan mangetahui kemampuan komunikan yakni masyarakat desa, komunikator dapat mengartikan pesan sesuai dengan batas kemampuan komunikan dalam menerima pesan. Seperti yang diungkapkan Bapak Drs. H. Jamil selaku Kades Tegalondo bahwa :

“Dalam mengadakan komunikasi perencanaan pembangunan dengan masyarakat saya selalu menyesuaikan pesan komunikasi yang akan disampaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi komunikan Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah mengartikan pesan yang disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat. (wawancara di kantor desa pada 11 mei 2011)

Selain itu komunikator dalam mengadakan komunikasi perencanaan pembangunan dengan masyarakat menyesuaikan

pesan komunikasi yang akan disampaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Kaur Pembangunan Bapak Yadi S. yang menyatakan bahwa :

“Dengan melihat tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas menengah kebawah, tentunya cara komunikasi langsung merupakan cara yang paling tepat, karena pesan yang disampaikan oleh komunikator telah diformulasikan sedemikian rupa sehingga mudah untuk diterima dan ditafsirkan oleh masyarakat.” (wawancara di kantor desa pada 5 mei 2011)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor penting yang mendukung lancarnya komunikasi adalah komunikator mengetahui kemampuan komunikan.

Dengan melihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Tegalondo yang mayoritas menengah kebawah, tentunya cara komunikasi langsung merupakan cara yang paling tepat, karena pesan yang disampaikan oleh kepala desa telah diformulasikan sedemikian rupa sehingga mudah untuk diterima dan ditafsirkan oleh masyarakat.

3) Kejelasan pesan

Salah satu hal penting dalam proses komunikasi adalah kejelasan pesan. Pesan yang jelas dapat dengan mudah dimengerti oleh komunikan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Drs. H. Jamil selaku Kepala Desa Tegalondo bahwa :

“Kejelasan pesan dalam komunikasi merupakan kunci dari komunikasi pada masyarakat. Faktor ini menjadi sangat penting sebab apabila pesan yang disampaikan tidak jelas atau tidak dapat dimengerti oleh komunikan yakni

masyarakat desa maka penerimaan pesan akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat mengenai pembangunan desa, saya selalu berusaha menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat Desa tegalgondo.” (wawancara di kantor desa pada 13 mei 2011).

Dalam melakukan komunikasi pembangunan dengan masyarakat kepala desa melibatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu penyampaian pesan kepada masyarakat secara umum.

b. Faktor Penghambat Komunikasi

Komunikasi sering tidak efektif, dengan adanya hal-hal yang menghambat penyampaian pesan komunikasi tersebut. Proses komunikasi pembangunan di desa Tegalgondo juga tidak selalu efektif. Ini terbukti dengan adanya hal-hal yang bersifat mengganggu jalannya proses komunikasi antara lain waktu yang panjang, keterbatasan kemampuan untuk mengartikan pesan, kualitas aparatur pemerintah Desa, keterbatasan sarana dan prasarana, faktor alam dan cuaca. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Jamil selaku kepala Desa tegalgondo bahwa :

“Dalam proses komunikasi pembangunan dengan masyarakat, banyak hal yang memungkinkan menjadi hambatan dalam pelaksanaan komunikasi itu sendiri. Misalnya waktu yang panjang dalam penyusunan rancangan pembangunan, kualitas aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana, dan juga faktor alam.” (wawancara di kantor desa pada 13 mei 2011)

Dari wawancara diatas dapat diketahui terdapat beberapa faktor penyebab terhambatnya komunikasi dalam pembangunan desa. faktor-faktor tersebut antara lain :

1) Waktu yang panjang

Pemahaman isi pesan merupakan hal pokok yang menunjang pelaksanaan komunikasi pembangunan, karena pesan harus melalui tingkatan tambahan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai tujuan. Pemerintah desa dalam melaksanakan proyek pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang serta dana yang mencukupi. Perhitungan yang tepat sering membutuhkan proses yang lama. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh ketua LPMD Bapak Husnan S.T yang menyatakan bahwa :

“Perhitungan dan perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk melaksanakan pembangunan yang efektif, proses penyusunan rancangan pembangunan sering memakan waktu yang panjang, karena aparatur pemerintah desa kurang mengerti dalam penyusunan RPJM desa, sehingga penyusunan RPJM banyak dibebankan pada kepala desa yang menyebabkan pengesahan RPJM desa memakan waktu yang lama.” (wawancara di rumahnya, pada 15 mei 2011)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses komunikasi yang memakan waktu yang lama terletak pada proses penyusunan rancangan pembangunan, hal ini menyebabkan proses pengesahan memakan waktu yang lama.

2) **Kualitas aparatur desa**

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas pribadi maupun sekelompok manusia. Tanpa menjalankan pendidikan atau memiliki ilmu pengetahuan, sulit bagi seseorang untuk mencapai tingkat kualitas tertentu. Tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa yakni menengah ke bawah, rata-rata lulusan SMA dan SMP. Namun kurang mengertinya aparatur pemerintahan dalam membuat dan menyusun identifikasi kebutuhan prioritas masyarakat serta rancangan pembangunan. Hal ini mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak tersampaikan sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang dirasakan oleh masyarakat.

3) **Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat**

Disini peran yang seharusnya ditunjukkan masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai penentu kebijakan pembangunan bersama-sama dengan Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa. Tetapi dalam banyak hal masyarakat kurang begitu dilibatkan dalam penyusunan identifikasi kebutuhan, selain itu ada sebagian kelompok masyarakat yang apatis dan tidak mau berurusan dengan pembangunan, kelompok masyarakat yang seperti ini biasanya adalah golongan menengah keatas yang bermukim di perumahan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kaur Pembangunan Bapak Yadi S. bahwa :

“Peran masyarakat secara umum dalam pembangunan saat ini bisa dikatakan rendah, hal ini semakin sering terjadi dalam beberapa tahun ini, masyarakat sepertinya tidak mau tahu terhadap pembangunan yang terjadi di desanya, mereka sudah disibukkan dengan aktivitasnya sendiri sehingga sifat kegotongroyongan dalam pembangunan semakin lama makin hilang.”(wawancara di kantor desa, pada 3 juni 2011)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tegalgondo dewasa ini kurang begitu berperan aktif dalam pembangunan yang terjadi di desanya, tentunya ini mengakibatkan pembangunan yang terjadi kurang begitu dirasakan oleh masyarakat.

4) Sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai bagi suatu organisasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana komunikasi dalam menunjang penyampaian pesan kepada masyarakat. Peralatan kantor dan media dalam komunikasi kurang tersedia di Desa Tegalgondo. Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Urusan Umum Ibu Sani yang menyatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana yang ada desa memang perlu ada penambahan dan perbaikan. Dalam pelaksanaan rapat maupun pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di kantor desa, media dan alat dalam berkomunikasi banyak yang rusak, serta perlunya penambahan alat-alat komunikasi seperti proyektor, mik, dan sound system.” (wawancara di kantor desa pada 17 mei 2011)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa perlu adanya penambahan alat komunikasi seperti proyektor (LCD) dan perbaikan alat-alat komunikasi seperti pengeras suara dan sound system.

C. Pembahasan

1. Audit pada Proses Komunikasi Kepala Desa dalam Pembangunan Desa

Kegiatan-kegiatan dalam manajemen pembangunan desa menurut Tjokroamidjojo (1987:50) adalah :

- a. Perencanaan : yaitu menyangkut apa yang harus dikerjakan dalam mencapai tujuan pembangunan desa dan siapa yang mengerjakannya.
- b. Pelaksanaan : yaitu kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
- c. Pengawasan : yaitu memonitor, menilai apa yang dikerjakan atau dilaksanakan sesuai apa yang ditetapkan.

a. Komunikasi pada Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam melaksanakan progam pembangunan sangat penting untuk menetapkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang bagaimana harus melakukan suatu kegiatan, dan standar kinerja yang dianggap memuaskan atau memenuhi syarat sehingga kemudian dapat digunakan untuk menyatakan kualitas kegiatan komunikasi tertentu, baik dalam bagian-bagiannya maupun secara keseluruhan. Menurut Andre Hardjana (2000:49) Standar-standar kinerja tersebut dapat berbentuk eksplisit seperti program perencanaan dan ditentukan berdasarkan

keepakatan bersama. Teori yang diampaikan oleh Andre Hardjana ini sesuai dengan kegiatan komunikasi pada perencanaan pembangunan yang terjadi di Desa Tegalondo. Komunikasi pada perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa dilakukan dengan jalan mengadakan pertemuan dengan LPMD, perangkat desa, dan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat bermusyawarah menyusun rencana pembangunan, yang didasarkan pada daftar usulan rencana pembangunan (DURP) untuk menentukan kebutuhan mana yang paling prioritas dan segera perlu direalisasikan.

1. Penyerapan Aspirasi Masyarakat Sebagai Dasar Penyusunan DURP

Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa harus sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan. Hasil penelitian menunjukkan penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan oleh Kepala Desa, LPMD, dan Kaur Pembangunan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. DURP didasarkan pada identifikasi kebutuhan yang terjadi di masyarakat.

Aparatur pemerintah desa dalam menyusun DURP biasanya didasarkan pada hasil musyawarah tingkat desa yang memuat kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa yang digunakan sebagai dasar penyusunan daftar usulan rencana proyek untuk kemudian pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ditentukan mana kebutuhan yang paling prioritas untuk dilaksanakan.

2. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

Langkah awal sebelum ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data yang mempunyai kaitan dengan faktor-faktor yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Soewignyo (1985:85) bahwa identifikasi masalah adalah kegiatan pertama dari unsur perencanaan pembangunan untuk menginventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desa. Keadaan yang terjadi di Desa Tegalondo sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soewignyo yakni Kepala Desa dibantu dengan perangkat desa dan LPMD melakukan identifikasi kebutuhan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan. Identifikasi kebutuhan selalu melibatkan tokoh masyarakat dan wakil-wakil masyarakat (RW dan RT) yang dianggap mewakili aspirasi kepentingan masyarakat. sebelum disampaikan dalam musyawarah pembangunan, terlebih dahulu LPMD dan Kaur Pembangunan menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan mengumpulkan data-data di lapangan. Identifikasi kebutuhan di Desa Tegalondo cukup merata di setiap lingkungan RW dan RT. Dengan demikian komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat harus cermat dan teliti mengarahkan semua kebutuhan masyarakat pada kepentingan bersama, mengingat tidak semua identifikasi kebutuhan dapat dijadikan proyek pembangunan.

2. Peran Artikulasi Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan

Artikulasi Kepentingan menurut Haryanto (2005:12) adalah cara yang ditempuh oleh suatu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingan mereka adalah dengan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tersebut kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijaksanaan.

Kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut diartikulasikan oleh berbagai lembaga, badan atau kelompok dengan berbagai macam cara. Lembaga-lembaga, badan-badan ataupun kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat tadi dibentuk oleh pihak swasta (masyarakat sendiri) maupun yang dibentuk oleh pihak pemerintah, yang perlu diperhatikan di dalam hal ini adalah fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, badan-badan atau kelompok-kelompok didalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan komunikasi pada perencanaan pembangunan, Kepala Desa selalu melibatkan perangkat desa, dan LPMD sebagai komunikator. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh (Goldhaber, 1993:12) bahwa organisasi juga melakukan komunikasi eksternal dengan publik-publik eksternal yang berkaitan dengannya. Komunikasi tersebut terjadi setiap hari dengan menggunakan berbagai media dan memiliki tujuan. Hal ini dimaksudkan agar pesan komunikasi mengenai perencanaan pembangunan

desa dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dan tentunya hal ini akan membantu kepala desa untuk mempengaruhi masyarakat.

Setiap komunikator memiliki peran yang sentral dalam penyampaian informasi, disini akan diuraikan peran masing-masing komunikator dalam rangka perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Kepala Desa adalah sebagai sebagai pemimpin musyawarah pembangunan desa dan bertanggungjawab mengarahkan kebutuhan masyarakat pada kepentingan bersama penentu rencana program pembangunan.
2. Perangkat Desa sebagai penyusun daftar usulan rancangan pembangunan, disini perangkat desa melakukan identifikasi kebutuhan yang diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan, kemudian data tersebut disusun sebagai suatu rencana untuk ditentukan kebutuhan yang merupakan super prioritas (kebutuhan mendesak) dan skala prioritas (kebutuhan kurang mendesak). Sedangkan LPMD juga sebagai penyusun daftar usulan rencana proyek (DURP). Dalam pelaksanaan komunikasi pada perencanaan. LPMD bersama Kepala Desa mengadakan rapat internal untuk menyusun, rancangan pembangunan, hasil dari pertemuan/rapat tersebut nantinya dituangkan dalam keputusan Kepala Desa sebagai dasar penyusunan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP).
3. Masyarakat menyampaikan usulan rencana pembangunan melalui RT, RW, maupun tokoh masyarakat yang diwujudkan dalam sebuah forum seperti rapat yang membahas tentang rencana yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tegalondo sebagai

contoh forum/rapat tersebut adalah musyawarah tingkat dusun (Murdus), musayawarah tingkat desa (Murdes). Para wakil masyarakat ini akan menampung aspirasi masyarakat kemudian akan disampaikan di depan forum rapat perencanaan pembangunan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peran akulturasi kepentingan dalam perencanaan pembangunan adalah saling berkaitan, perencanaan pembangunan tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama diantara masing-masing pihak.

3. Cara Komunikasi

Komunikasi langsung dalam proses komunikasi pada perencanaan pembangunan sangat sering digunakan. Karena dengan komunikasi langsung, pesan yang disampaikan akan lebih diterima dan dimengerti. Komunikasi disini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam rapat/pertemuan untuk membahas perencanaan pembangunan yakni kepala desa, perangkat desa, LPMD, sebagai komunikator dan Ketua RW dan RT serta Tokoh Masyarakat sebagai komunikan yang menjadi sasaran penting dalam suatu proses komunikasi pada perencanaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan komunikasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Tegalgondo dilakukan secara langsung dan tidak langsung. secara langsung dilakukan dengan mengadakan rapat/pertemuan untuk membahas perencanaan pembangunan. Penentuan rencana pembangunan ini dilakukan secara musyawarah untuk

memperoleh hasil yang menjadi kesepakatan bersama, sehingga rencana pembangunan yang dibuat mengacu pada kepentingan masyarakat. Sedangkan cara tidak langsung dilakukan oleh Kepala Desa dengan membuat surat perintah pelaksanaan pembangunan kepada LPMD untuk segera melaksanakan pembangunan. Cara komunikasi seperti ini dulu sering digunakan, namun pada saat ini sangat jarang digunakan, karena rawan terjadi penyelewengan dan kepentingan pribadi.

4. Kegiatan Komunikasi dalam Perencanaan

Komunikasi yang dilakukan pada perencanaan pembangunan di Desa Tegalgondo adalah komunikasi secara langsung. Seperti yang disampaikan oleh onong (2006:125) tentang jenis komunikasi yang sering digunakan dalam proses penyampaian pesan adalah komunikasi tatap muka (face to face communication), komunikasi ini berlangsung secara dialogis sehingga terjadi kontak pribadi (personal contact). Teori yang dikemukakan oleh Onong tersebut sesuai dengan komunikasi secara langsung yang terjadi dalam proses komunikasi pada perencanaan pembangunan desa yaitu pelaksanaan komunikasi dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengadakan rapat/pertemuan untuk membahas rancangan program pembangunan desa. Dalam rapat/pertemuan tersebut dibahas kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat, identifikasi kebutuhan didasarkan pada kepentingan masyarakat di masing-masing dusun, setelah dibahas masalah usulan-usulan kebutuhan masyarakat, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai keputusan bersama berdasarkan anggaran yang dimiliki oleh desa dan ditentukan jumlah perkiraan

pengeluaran dana/biaya pembangunan sesuai prioritas atau program pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi kebutuhan masyarakat Desa Tegalondo tahun anggaran 2010-2011 sebanyak 14 buah, setelah hasil musyawarah perencanaan pembangunan menghasilkan keputusan sebagai prioritas sebanyak 7 buah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua hasil identifikasi kebutuhan dapat dijadikan prioritas kebutuhan. Pada proses pelaksanaannya komunikator yang terdiri dari Kepala Desa, LPMD, Perangkat Desa dalam penyampaian pesan komunikasi perencanaan pembangunan jarang menggunakan media grafik, statistik, maupun monografi sertapeta, karena media tersebut hanya dapat dipakai pada masyarakat yang mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, yang tidak mungkin diterapkan pada masyarakat secara umum. Berikut adalah gambaran suasana rapat perencanaan pembangunan yang terjadi di Desa Tegalondo



Foto Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tegalondo 2010-2011

Salah satu definisi komunikasi organisasi yang ada adalah definisi komunikasi menurut Redding dan Sanborn (1992:121). Menurut mereka, komunikasi organisasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan informasi dalam suatu organisasi yang kompleks, meliputi Komunikasi internal yang terjadi diantara orang-orang yang berada didalam suatu organisasi meliputi komunikasi vertikal dari atas ke bawah (downward) maupun komunikasi dari bawah ke atas (upward) dan komunikasi horisontal diantara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya dalam suatu organisasi. Komunikasi yang terjadi dalam pembangunan di Desa Tegalondo pada dasarnya adalah berbentuk sosialisasi program pembangunan desa. Dalam prosesnya usulan-usulan mengenai rancangan pembangunan telah terlebih dahulu dibuat dalam bentuk daftar usulan rancangan pembangunan (DURP) oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan LPMD untuk kemudian dibahas dalam rapat/pertemuan dengan masyarakat, dan selanjutnya ditentukan program pembangunan mana yang merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan.

Strategi komunikasi merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu pesan dari komunikator kepada komunikan. Strategi komunikasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan yaitu strategi komunikasi menurut Efendi (1993:28) pada dasarnya merupakan cara/siasat mengenai suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam pelaksanaan komunikasi agar berjalan lancar maka perlu menggunakan strategi yang cermat. Strategi komunikasi dalam rangka

menyampaikan pesan informasi terletak pada waktu pelaksanaan komunikasi. Apabila waktu yang digunakan untuk melakukan komunikasi tepat maka tujuan komunikasi yang diharapkan mudah tercapai.

Melihat mata pencaharian penduduk desa tegalgondo yang mayoritas sebagai petani, maka dengan berpedoman pada waktu-waktu tertentu dalam mengadakan komunikasi, Kepala Desa sangat memperhatikan waktu pelaksanaan pertemuan dengan masyarakat. Agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk menghadiri pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa tanpa merugikan waktu yang dimiliki oleh masyarakat. Manajemen waktu sangat penting untuk diperhatikan, baik itu dilaksanakan pada pagi hari, sore hari maupun malam hari, hal tersebut merupakan jalan yang bisa mendukung efektifitas komunikasi.

Mengingat komunikasi sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat desa tegalgondo adalah menggunakan bahasa jawa yang sekaligus merupakan bahasa yang dikuasai masyarakat selain bahasa Indonesia, maka bahasa yang digunakan oleh kepala desa dalam komunikasi pembangunan dengan masyarakat adalah bahasa campuran indonesia dengan jawa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah mengartikan pesan yang disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat.

Berdasarkan data hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa, cara komunikasi langsung ini mempunyai keuntungan, yaitu :

- a) Mudah dilaksanakan
- b) Memungkinkan terjadi komunikasi timbal balik atau dua arah yaitu komunikator menyampaikan pesan kepada masyarakat selaku komunikan, sedangkan masyarakat Desa Tegalgondo mempunyai kesempatan untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan yang belum dimengerti secara langsung kepada kepala desa sebagai komunikator.
- c) Tingkat umpan balik masyarakat cenderung tinggi.

Meskipun komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa di dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan komunikasi langsung, namun tidak setiap perencanaan pembangunan selalu demikian. Kepala desa dalam beberapa kesempatan juga menggunakan cara komunikasi tidak langsung. Hal ini dilakukan apabila dipandang oleh kepala desa pembangunan perlu segera dilaksanakan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Dengan melihat bahwa cara komunikasi tidak langsung tersebut hanya dilakukan apabila diperlukan, maka tentunya hal ini sangat jarang dilakukan.

b. Komunikasi pada Pelaksanaan Pembangunan

1. Cara komunikasi

Proses komunikasi menunjukkan kaitan antara satu elemen dengan elemen komunikasi lainnya dan menunjukkan proses bagaimana suatu pesan atau informasi bisa sampai ke penerima. Karena komunikasi merupakan proses dua arah atau timbal balik maka komponen balikan perlu ada dalam proses komunikasi. Komunikasi langsung dalam proses komunikasi sangat sering

dilakukan. Karena dengan komunikasi langsung, pesan yang disampaikan akan lebih dapat diterima dan dimengerti (Jiwanto, 1985:35).

Komunikasi langsung dalam proses komunikasi pada pelaksanaan pembangunan sangat sering digunakan karena dengan komunikasi langsung pesan yang disampaikan akan mudah dimengerti. Berdasarkan data yang diperoleh komunikasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan pembangunan adalah dengan menggunakan komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan komunikasi yang sifatnya langsung yang dilakukan oleh komunikator khususnya kepala desa dilaksanakan dengan cara tatap muka (*face to face*) serta berdialog secara langsung dengan pelaksana kegiatan (TPK). Sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan dengan menunjuk orang-orang tertentu seperti perangkat desa atau ketua LPMD untuk meninjau lokasi pembangunan. Berhubung tenaga dan waktu yang dimiliki oleh kepala desa sangat terbatas, tentunya hal ini akan berpengaruh pada tingkat frekwensi kedatangan kepala desa ke lokasi pembangunan, dan akibatnya kepala desa tidak bisa terus-menerus datang untuk mengadakan komunikasi langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam lokasi pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa komunikasi yang sering digunakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah komunikasi secara langsung, sedangkan komunikasi tidak langsung sangat jarang dilakukan. Karena Kepala Desa hanya melakukan komunikasi secara tidak langsung ini jika dirasa terdapat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Kepala Desa

2. Kegiatan Komunikasi dalam Pelaksanaan

Komunikasi secara langsung yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalondo adalah komunikasi secara langsung dimana komunikator terjun langsung ke lokasi pembangunan. Dalam prakteknya Kepala desa beserta perangkat desa maupun LPMD meninjau lokasi untuk melihat perkembangan proyek pembangunan serta berdialog langsung dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Dwijowijoko (2004:23) yang menyatakan komunikasi yang efektif dalam pembangunan dilakukan dengan ikut ambil bagian dalam pembangunan itu sendiri. Dengan demikian maka komunikasi tersebut bisa berjalan dua arah yang tentunya akan memperoleh suatu hasil komunikasi secara efektif, karena pelaksana kegiatan (TPK) mempunyai kesempatan langsung untuk menanyakan atau memberi masukan kepada kepala desa mengenai pembangunan desa. Disamping kedatangan kepala desa ke lokasi pembangunan secara sendiri, beliau juga secara bersama-sama dengan perangkat desa maupun dengan anggota LPMD. Disini kepala desa beserta staf dari LPMD memberi penerangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan untuk tetap mengacu pada rancangan pembangunan yang sudah dibuat. Perihal kendala-kendala yang kemudian muncul selama pelaksanaan pembangunan hal itu akan ditampung oleh kepala desa untuk kemudian diadakan suatu pertemuan yang secara khusus membahas masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan untuk membahas cara pemecahannya yang dihadapi

kepala desa, Perangkat Desa, LPMD (lembaga Permusyawaratan Desa), dan Tim Pelaksana Kegiatan.

Selain itu dengan cara terjun langsung ke lokasi pembangunan. Komunikasi yang dilakukan Kepala Desa pada pelaksanaan pembangunan juga dilakukan secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung dilakukan dengan menunjuk orang-orang tertentu seperti perangkat desa atau ketua LPMD untuk meninjau lokasi pembangunan. Hal ini sangat jarang dilakukan karena Kepala Desa hanya melakukan komunikasi secara tidak langsung ini jika dirasa terdapat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Kepala Desa. Cara komunikasi seperti ini tentunya hanya merupakan jalan lain sebagai pelengkap dan dilakukan apabila diperlukan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian kepala desa bisa memilih cara komunikasi yang tepat sesuai dengan pertimbangan yang ada.

Dari uraian diatas dapat dapat diketahui pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa pada pelaksanaan pembangunan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yakni dengan terjun langsung pada lokasi pembangunan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan aparatur pemerintahan desa. Sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan menunjuk orang-orang tertentu seperti perangkat desa atau ketua LPMD untuk meninjau lokasi pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui disamping komunikasi yang dilaksanakan oleh kepala desa berlangsung di lokasi pembangunan,

komunikasi tersebut juga berlangsung di luar lokasi pembangunan. Dengan cara komunikasi yang demikian maka merupakan suatu kesempatan yang baik bagi untuk saling mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka, baik dari kepala desa dan aparaturnya selaku komunikator maupun pelaksana kegiatan, dalam hal ini Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku komunikan. Selama pertemuan mereka bisa langsung menyampaikan pesan serta membahas kendala-kendala yang terjadi dan secara bersama-sama membuat solusi untuk permasalahan selama pelaksanaan pembangunan tersebut.

c. Komunikasi pada Pengawasan Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi yang dilakukan pada pengawasan pembangunan dibedakan menjadi dua macam yakni komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan dengan cara mengadakan suatu pertemuan dengan perangkat desa, LPMD, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pertemuan yang dilakukan biasanya secara informal selama pengawasan dalam pembangunan dilakukan setiap 2 minggu sekali selama proses pembangunan. Namun pada pelaksanaannya cukup relatif dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Bonar (1993:4) yang menyatakan salah satu media komunikasi adalah media pertemuan yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung seperti kongres, konferensi, dan rapat. Untuk lebih jelasnya berikut adalah gambaran rapat pada pengawasan pembangunan di Desa Tegalgondo tahun anggaran 2010-2011



Rapat/pertemuan informal pada pengawasan pembangunan di Desa Tegalgondo

Sedangkan pelaksanaan komunikasi secara tidak langsung dilakukan dengan melalui surat atau laporan yang telah dibuat oleh perangkat desa maupun ketua LPMD. Komunikasi yang menggunakan media laporan pertanggung jawaban adalah untuk melaporkan hasil pembangunan kepada Kepala Desa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam pengawasan pembangunan menggunakan cara komunikasi langsung dengan menggunakan media pertemuan dan cara komunikasi tidak langsung dengan menggunakan media laporan pertanggung jawaban. Penggunaan cara-cara komunikasi tersebut dilakukan Kepala Desa sesuai dengan ketersediaan waktu yang dimiliki.

1. Kegiatan Komunikasi dalam Pengawasan

Komunikasi dalam pengawasan pembangunan dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara mengadakan suatu pertemuan dengan perangkat desa, LPMD, dan Tim Pelaksana Kegiatan. Di dalam pertemuan tersebut kepala desa mengevaluasi pelaksanaan proyek pembangunan serta membicarakan

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan. Disamping memberikan penerangan mengenai pembangunan kepala desa juga menyerahkan mandat kepada perangkat desa, LPMD, dan panitia pembangunan untuk mengawasi pembangunan yang ada. Dengan demikian Kepala Desa disini telah membagi tugasnya kepada perangkat desa dan LPMD, untuk ikut bertanggungjawab mengawasi pembangunan yang ada. Hal yang demikian ini tentunya bagi Kaur Pembangunan sebagai perangkat desa merupakan perwujudan fungsi sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya dan melaksanakan kebijaksanaan kepala desa. Dengan memberikan kekuasaan untuk mengawasi pembangunan yang ada tersebut, maka kepala desa bila menginginkan komunikasi pembangunan yang ada cukup dengan menghubungi perangkat desanya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Melihat keadaan yang demikian tentunya kepala desa bisa memilih cara mana yang sekiranya lebih menguntungkan. Disamping komunikasi pada pengawasan dilakukan oleh Kaur Pembangunan dan LPMD, namun bukan berarti terlepas dari yang lain. Hal ini bagi kepala desa merupakan input untuk mengawasi hasil-hasil pembangunan, terlebih apabila pesan tersebut berasal dari orang-orang yang merasa bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jalan lain yang ditempuh Kepala Desa dalam melakukan komunikasi selama mengadakan pengawasan adalah dengan cara tidak langsung yakni melalui surat atau laporan yang telah dibuat oleh Kaur Pembangunan maupun

ketua LPMD. Dengan hal ini tentunya kepala desa akan bisa terus mengawasi tanpa harus terjun ke lapangan sehingga menjadi efektif dari segi waktu dan tenaga.

d. Hasil-hasil Pembangunan

Hasil-hasil pembangunan yang terjadi pada tahun anggaran 2010-2011 di Desa Tegalondo adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan Pasar Desa



2) Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



3) Renovasi Balai Desa



4) Pembangunan Jalan Sawah



5) Pembangunan Pos Kamling



6) Perbaikan Jalan Desa



7) Perbaikan Jalan Lintas



Dengan melihat hasil pembangunan yang ada selama tahun 2010-2011, tampaklah bahwa pembangunan yang ada sudah cukup banyak. Hal ini tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan komunikasi yang dilakukan. Semakin banyak pembangunan yang ada maka semakin sering pula Kepala Desa melakukan kegiatan komunikasi, yang tentunya dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut, baik dilakukan sendiri selaku komunikator maupun bersama-sama perangkat desa, anggota LPMD, serta tokoh masyarakat.

Dengan demikian tampaklah bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa melibatkan juga perangkat desa, LPMD, maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Untuk mewujudkan pembangunan yang ada tentunya diperlukan pula partisipasi dari masyarakat. agar partisipasi tersebut bisa terwujud tentunya dibutuhkan komunikasi yang efektif, serasi dan efisien, sebab dengan komunikasi partisipasi masyarakat dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan.

Dari pembangunan yang ada di Desa Tegalgondo ini, pembangunan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan atau memperlancar komunikasi juga dilaksanakan seperti pembangunan/perbaikan balai desa dan jalan desa. Bangunan-bangunan tersebut merupakan tempat yang bisa dipakai untuk melaksanakan komunikasi serta penyebaran pesan, selain itu juga dilakukan pembangunan prasarana seperti jalan dan jembatan sebagai pendukung jalannya komunikasi yang menghubungkan masyarakat Desa tegalgondo dengan daerah sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa di Desa Tegalgondo ini, masalah komunikasi telah mendapat perhatian dari desa, disamping masalah lainnya tentunya.

Dengan banyaknya pembangunan yang terjadi tentunya akan menunjang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, hal yang demikian ini akan dapat menciptakan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik serta diharapkan masyarakat akan aman dan sejahtera.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Komunikasi Pembangunan Desa.

a. Faktor pendukung komunikasi

Dalam pelaksanaan komunikasi, tentulah ditunjang oleh faktor pendukungnya. Ada banyak faktor yang menjadi penentu dalam komunikasi yang efektif. Moekijat (1993:21) menjelaskan beberapa faktor pendukung komunikasi yang efektif, antara lain kemampuan orang untuk menyampaikan informasi, saluran komunikasi yang jelas dan langsung, media yang memadai untuk menyampaikan pesan, penentuan waktu, penerima informasi dan penafsiran yang tepat dan juga penggunaan informasi yang efektif. Begitu juga dalam pelaksanaan komunikasi dalam pembangunan di Desa Tegalondo yang ditunjang oleh faktor-faktor yang mendukung berjalannya keefektifan komunikasi itu, antara lain :

1) Media yang memadai untuk menyampaikan pesan

Dalam setiap proses komunikasi, diperlukan media untuk menyampaikan pesan informasi kepada komunikan. Penggunaan media yang memadai akan membuat proses komunikasi yang terjadi semakin lancar. Media yang memadai disini haruslah media yang sesuai dengan jenis informasi yang disampaikan. Sehingga informasi yang disampaikan dapat tepat sasaran dan dapat dimengerti oleh komunikan. Penggunaan media yang tepat diharapkan dapat memperlancar komunikasi yang terjadi.

2) Komunikator Mengetahui Kemampuan Komunikasikan

Faktor pendukung lainnya dalam proses komunikasi ini adalah komunikator mengetahui kemampuan komunikasikan, komunikator dapat mengartikan pesan sesuai dengan batas kemampuan komunikasikan dalam menerima pesan. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan di Desa Tegalondo, dimana kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa mengetahui kemampuan aparat pemerintah desa, serta tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata menengah kebawah. Dalam penyampaian pesan pembangunan kepada masyarakat kepala desa dan aparat pemerintahan desa harus memformulasikan isi pesan agar dapat dimengerti dan mudah diterima oleh masyarakat.

3) Kejelasan Pesan

Kejelasan pesan merupakan faktor pendukung komunikasi lainnya. Pesan yang jelas dapat dengan mudah dimengerti oleh komunikasikan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa proses komunikasi pembangunan yang terjadi di Desa Tegalondo berjalan cukup baik, dalam pelaksanaannya kepala desa dengan melibatkan aparat pemerintahan desa, LPMD, serta tokoh masyarakat melaksanakan komunikasi pembangunan sering dengan cara komunikasi langsung yang dibantu dengan

komunikasi tidak langsung. Hasil proses komunikasi tersebut, pembangunan desa berjalan cukup baik meskipun dalam beberapa proyek pembangunan mengalami keterlambatan, akan tetapi secara keseluruhan proyek pembangunan desa berjalan baik.

b. Faktor penghambat komunikasi

Komunikasi sering tidak efektif, dengan adanya hal-hal yang menghambatnya. Proses komunikasi pembangunan di Desa tegalgondo juga tidak selalu efektif. Ini terbukti dengan adanya hal-hal yang bersifat mengganggu jalannya proses komunikasi. Berdasarkan penelitian, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat proses komunikasi, antara lain :

1) Waktu yang Panjang

Pemerintah desa dalam melaksanakan proyek pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang serta dana yang mencukupi. Perhitungan yang tepat sering membutuhkan proses yang lama. Dalam proyek pembangunan terkadang muncul masalah-masalah yang terjadi, baik itu selama perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek pembangunan. Akibat dari hal tersebut maka pembangunan yang terjadi akan mengalami stagnasi ataupun keterlambatan dan tentunya hal itu mengurangi efektifitas dan efisiensi komunikasi dalam pembangunan.

2) Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa

Tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa yakni menengah ke bawah, rata-rata lulusan SMA dan SMP. Namun

kurang mengertinya aparaturnya pemerintahan dalam membuat dan menyusun identifikasi kebutuhan prioritas masyarakat serta rancangan pembangunan mengakibatkan pengesahan yang lama. Proses komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dua arah antara komunikan dan komunikator serta kurang menimbulkan timbal balik bahkan sering dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan berjalan satu arah.

3) Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu faktor poko dalam keberhasilan pembangunan. Namun yang terjadi selama penelitian ini dilakukan. Selama proses komunikasi pembangunan, dalam banyak hal masyarakat kurang begitu dilibatkan, khususnya dalam penyusunan identifikasi kebutuhan, selain itu ada sebagian kelompok masyarakat yang apatis dan tidak mau berurusan dengan pembangunan, kelompok masyarakat yang seperti ini biasanya adalah golongan menengah keatas dan masyarakat yang bermukim di perumahan.

4) Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan komunikasi dalam pembangunan adalah tersediannya sarana dan prasarana komunikasi yang memadai. Jika sarana dan prasarana komunikasi tidak memadai akan mengakibatkan penyampaian pesan informasi pembangunan tidak berjalan

maksimal. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Masmuh (2008:82) menyatakan bahwa hambatan-hambatan dalam proses komunikasi dapat timbul dalam berbagai bentuk yaitu hambatan yang bersifat teknis, dan hambatan perilaku. Namun yang terlihat pada proses komunikasi dalam pembangunan di Desa Tegalgondo yaitu hambatan yang bersifat tekhnis yakni hambatan kurangnya sarana alat dan media komunikasi.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Urusan Umum Ibu Sani menunjukkan bahwa dalam bahwa perlu adanya penambahan proyektor (LCD) dan perbaikan alat-alat komunikasi seperti pengeras suara dan sound system. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran arus penyampaian informasi seperti dalam pertemuan atau rapat mengenai pembangunan yang dilakukan di kantor desa maupun balai dusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil audit pada proses Komunikasi Kepala Desa dalam pembangunan yang terjadi di Desa Tegalgondo. Untuk proses pelaksanaan komunikasinya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Bentuk komunikasi langsung berupa rapat, ceramah, dan pertemuan. Sedangkan Proses Komunikasi dalam pembangunan yang sifatnya tidak langsung dengan menggunakan media surat dan laporan pertanggungjawaban. Proses komunikasi pada pembangunan desa dibedakan menjadi tiga tahapan yakni :
 - a) Komunikasi pada Perencanaan Pembangunan
 - b) Komunikasi pada Pelaksanaan Pembangunan
 - c) Komunikasi pada Pengawasan Pembangunan

Dalam proses komunikasi pada pembangunan dapat diketahui hal-hal pokok yang terjadi dalam komunikasi pembangunan desa, antara lain :

- ❖ Materi/pesan yang disampaikan dalam komunikasi menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan desa. misalnya identifikasi kebutuhan masyarakat, rencana pembangunan, laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan, pengawasan kegiatan dalam pembangunan. Dalam praktek

komunikasi yang terjadi dapat diketahui bahwa antara kepala desa dan masyarakat saling memberikan saran untuk memecahkan masalah bersama.

- ❖ Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan kepala desa dalam proses komunikasi pembangunan desa tidak selalu sama, baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dalam setiap tahapan pembangunan desa.
 - ❖ Dalam melaksanakan komunikasi dengan masyarakat, kepala desa perlu memformulasikan pesan-pesan yang disampaikan kedalam bentuk yang sederhana sehingga arti pesan bisa ditafsirkan dan mudah diterima oleh masyarakat sehingga proses timbal balik dalam komunikasi berjalan baik.
2. Faktor penentu komunikasi kepala desa dengan masyarakat dalam pembangunan yang terjadi di Desa Tegalgondo dapat dilihat dari dua hal yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam komunikasi ini meliputi media yang memadai untuk menyampaikan pesan, komunikator mengetahui kemampuan komunikan, dan kejelasan pesan. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah waktu yang panjang, kualitas aparatur pemerintahan desa, sarana dan prasarana.

B. Saran-saran

1. Penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas dalam komunikasi pembangunan sangat mendukung pemahaman isi pesan, sehingga kemampuan masyarakat untuk dapat menerima menjadi lebih baik.

2. Untuk mencapai efektivitas dalam bidang pembangunan tertentu, maka komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa seyogyanya selalu menggunakan jasa dan pengaruh tokoh-tokoh informal baik itu ketua RW atau RT setempat maupun pemuka agama.
3. Untuk lebih menyebarkan pesan yang akan disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat, hendaknya penyampaian pesan bukan hanya dilakukan pada tempat dan waktu yang formal, tetapi juga dilakukan pada tempat dan waktu yang informal seperti tempat ibadah serta pada waktu pengajian atau pertemuan-pertemuan informal lainnya. Disamping itu dalam menyampaikan isi pesan kepala desa hendaknya menggunakan cara yang menarik.
4. Dalam rangka mengadakan komunikasi dengan cara pertemuan atau rapat, hendaknya kepala desa memperhatikan dan memilih waktu yang tepat, agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk menghadirinya.
5. Untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, hendaknya pemerintah desa Tegalondo lebih mengintensifkan pendekatan-pendekatan langsung kepada masyarakat, terutama sosialisasi pembangunan yang perlu untuk lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrachman, Oemi. 1975. *Dasar-dasar Public Relation*. Penerbit Alumni, Bandung
- Aliyahbana, Iskandar. 1974. *Kemampuan Teknologi dan Pengaruh Terhadap Masyarakat*. Prisma LP3ES, Jakarta
- Bonar, Susilo K. 1981. *Hubungan Masyarakat Modern*. Penerbit Bina Aksara. Bandung
- Depari, Eduarad & Dr. Colin Mac Andrews. 1985. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*. UGM Press. Yogyakarta
- Dwijowijoko, Riant N. 2004. *Komunikasi Pemerintahan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Effendy, Onong Uchana. 1981. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Penerbit Alumni. Bandung
- Gie, The liang . 1968. *Kamus Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta
- Goldhaber, Gerald. 1990. *Organizational Communication*. Fifth Edition, Brown Publisher. Dubuque
- Greenbaum, Howard. 1974. *The Audit Of Organizational Communication*. Academy of Management Journal
- Gibson, Jane dan Richard Hodgetts. 1991. *Organizational Communication : A Managerial Perpective*. Harper Collin Publisher. New York
- Hardjana, Andre. 2000. *Audit Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Grasindo. Jakarta
- IABC Communication Bank. 1993. *Handbook of Communication Audit*. IABC Publisher. San Fransisco
- Jiwanto, Gunawan. 1985, *Komunikasi dalam Organisasi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Kratz, Ulrich. 1974. *Bahasa, Komunikasi dan Kontrol*. Prima, tahun ke 3. Jakarta.
- Marsono. 1980. *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Penerbit Ichtiar Baru. Jakarta
- Moekijat. 1993. *Teori Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju.

Odiorne, George . 1954. *An Aplication of The Communication Audit*. Personel Pshychology

Poerwodarminto, Widjoyo. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka. Jakarta

Riyadi, Slamet. 1986. *Pembangunan : Dasar-dasar dan Pengertiannya*. Usaha Nasional. Surabaya

Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Prenhallindo.

Susanto, S. Astrid. 1977. *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*. Bina Cipta. Jakarta

Suwardi, Harsono. 1974. *Problem Komunikasi Untuk Menunjang Pembangunan*. Prisma. Jakarta

Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Penerbit LP3ES. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketetapan MPR RI No. 11/MPR/1988, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

(Www.Sosialbudaya.Tvone.Co.Id/22/05/2010), Didownload Pada Tanggal 2 Mei 2010

(www.fwi.or.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2011

(www.malangkab.go.id/index1.php?kode=85

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut adalah acuan dasar pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh peneliti berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian

1. Bagaimana proses komunikasi yang terjadi selama ini antara kepala desa dengan masyarakat dalam pembangunan desa?
2. Bagaimana proses komunikasi yang terjadi pada perencanaan pembangunan?
3. Apakah ada tahapan-tahapan komunikasi pada perencanaan pembangunan? Bila ada tolong sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan tersebut?
4. Apa saja materi dan pesan yang dikomunikasikan pada perencanaan pembangunan?
5. Bagaimana proses komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan?
6. Bagaimana proses komunikasi yang terjadi pada pengawasan pembangunan?
7. Bagaimana bentuk dan cara komunikasi pada pengawasan pembangunan?
8. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses komunikasi pada pembangunan desa ?

